



Laporan Kinerja Interim Triwulan II Tahun 2022



Balai Besar POM di Jakarta

**Jl. As'syafiyah No.133, RT.3/RW.3, Cilangkap,
Kec. Cipayang, Kota Jakarta Timur**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas rahmat dan karunia yang diberikan sehingga Balai Besar POM di Jakarta dapat melaksanakan tugas dan fungsi yang dituangkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAPKIN) Triwulan II Tahun 2022. Laporan Kinerja dibuat secara berkala dan merupakan bentuk tanggung jawab dan akuntabilitas instansi terkait tugas perlindungan kepada masyarakat terhadap obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja dalam mengatasi kendala yang ditemukan dalam pencapaian target kinerja. Pencapaian kinerja Balai Besar POM di Jakarta diukur terhadap target dan realisasi kinerja tahun 2022, yang dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip pengembangan profesionalisme, perlindungan masyarakat dan pemerintahan yang akuntabel dan transparan. Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini terhadap target tahun 2022 (periode renstra 2020-2024), evaluasi dan pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja serta realisasi anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini diharapkan dapat memberikan gambaran akurat atas kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam memenuhi target yang telah ditetapkan bagi Balai Besar POM di Jakarta serta dapat memberikan kontribusi bagi upaya perbaikan secara berkesinambungan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi kinerja Balai Besar POM di Jakarta di masa yang akan datang.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 19 Juli 2022

Kepala Balai Besar POM di Jakarta



Dra. Susan Gracia Arpan, Apt, M.Si

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban untuk pencapaian sasaran strategis triwulan II pada tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Renstra BBPOM di Jakarta tahun 2021-2024 yang terdiri dari 11 sasaran strategis dengan 29 indikator kinerja utama. Dari 11 sasaran strategis terdapat 6 (enam) sasaran strategis dengan hasil capaian dengan kriteria “BAIK”. Terdapat 1 (satu) sasaran strategis dengan kriteria capaian “**SANGAT BAIK**” dan 4 (empat) sasaran strategis yang belum dapat dievaluasi dikarenakan nilai akan muncul pada akhir tahun 2022. Hasil capaian tiap sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis “Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 92,85%dengan kriteria “**BAIK**”
2. Sasaran strategis “Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, belum ada capaian pada triwulan II, nilai akan muncul pada akhir tahun 2022.
3. Sasaran strategis “Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, belum ada capaian pada triwulan II, nilai akan muncul pada akhir tahun 2022.
4. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 100,08%dengan kriteria “**BAIK**”
5. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta” dengan capaian sebesar 105,02%dengan kriteria “**BAIK**”
6. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 117,83%dengan kriteria “**SANGAT BAIK**”
7. Sasaran strategis “Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta”, dengan capaian sebesar 105,56%dengan kriteria “**BAIK**”
8. Sasaran strategis “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal”, , belum ada capaian pada triwulan II, nilai akan muncul pada akhir tahun 2022.
9. Sasaran strategis “Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal”dengan , belum ada capaian pada triwulan II, nilai akan muncul pada akhir tahun 2022.
10. Sasaran strategis “Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makana”, dengan capaian sebesar 97,78%dengan kriteria “**BAIK**”
11. Sasaran strategis “Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel”, dengan capaian sebesar 94,81%dengan kriteria “**BAIK**”

Pelaksanaan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis, Balai Besar POM di Jakarta didukung APBN

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 45.606.169.000,- (empat puluh lima milyar enam ratus enam juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah). Realisasi anggaran yang dibelanjakan pada Triwulan 2 tahun 2022 sebesar Rp 17.980.485.289 (Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah) dengan persentase serapan anggaran sebesar 39.43%.

HIGHLIGHT KINERJA

Dalam upaya perlindungan masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan dan untuk meningkatkan hasil pengawasan obat dan makanan di Balai Besar POM di Jakarta telah melakukan kegiatan **terobosan** di Triwulan II Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Bimbingan Teknis Pengujian Kosmetika”Identifikasi Klindamisin dan Merah K3 Dalam Sediaan Kosmetik Secara LCMS MS”

Selaras dengan visi dan misi Badan POM untuk mewujudkan Obat dan Makanan aman, bermutu dan berdaya saing serta membangun SDM unggul di bidang obat dan makanan, Balai Besar POM di Jakarta mengadakan Bimbingan Teknis Pengujian Kosmetik “Identifikasi Klindamisin dan Merah K3 Dalam Produk Kosmetik Secara LCMS MS” pada tanggal 28 Maret sampai 1 April 2022. Bimtek dibuka oleh Koordinator Poksi Pengujian Balai Besar POM di Jakarta Ibu Dra. Nurul Hidayah Hadiyati M.Si, Apt, dan diikuti oleh peserta dari BBPOM di Medan, BBPOM di Semarang, BBPOM di Surabaya, BBPOM di Makassar serta seluruh penguji Laboratorium Kosmetika BBPOM di Jakarta. Bertindak selaku nara sumber dan instruktur adalah Ibu Yustina S.Si, M.Si dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional dan Bapak Widi Tri Raharjo, S.Si, Apt dari PT. Kromtekindo Utama. Bimtek ditekankan pada peningkatan kemampuan personil pengujian dalam penerapan metode analisis menggunakan alat LCMSMS sehingga diperoleh hasil pengujian yang valid dan terpercaya

2. Bimbingan Teknis Uji Potensi Antibiotik Neomisin, Polimiksin, Vankomisin di Laboratorium Mikrobiologi BBPOM di Jakarta

Bimtek yang berlangsung dari tanggal 13-17 Juni 2022 dibimbing oleh narasumber dari Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan (PPPOMN), yakni Henny Setiawati, S.Si. Apt., M. Far. Kegiatan hari pertama dimulai dengan pelaksanaan pretest dan pemaparan materi dari narasumber yang dilanjutkan pembuatan media uji dan larutan baku di siang harinya. Sementara itu, praktik pengujian dilaksanakan di hari kedua hingga hari kelima. Pada hari kedua, peserta melakukan uji pendahuluan untuk menentukan persentase inokulum yang sesuai. Hasil dari uji pendahuluan tersebut digunakan untuk uji verifikasi metode uji potensi antibiotik neomisin, vankomisin dan polimiksin.

3. Laron Baja Raih Penghargaan (Lagi), Wujud Sinergi Nyata Dengan Bea Cukai

Layanan LARON BAJA kembali mendapatkan penghargaan. Penghargaan diberikan oleh Kepala Kantor Bea Cukai Pasar Baru dalam acara coffee morning sosialisasi pemaparan janji layanan dan standar pelayanan Bea Cukai Pasar Baru yang diselenggarakan di Aula Bea Cukai Pasar Baru, Kamis 12 Mei 2022. Dalam sambutannya, Kepala Kantor Bea Cukai Pasar Baru, Setiaji Tenggamus menyebutkan bahwa penghargaan tersebut diberikan atas sinergi, dukungan, dan kerja sama yang baik dalam pengelolaan barang kiriman impor. Penghargaan

tersebut diterima oleh Koordinator Kelompok Substansi Penindakan mewakili Kepala Balai Besar POM di Jakarta.

4. Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016 BBPOM di Jakarta Sebagai Komitmen Lawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Balai Besar POM di Jakarta telah mendapat predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dari Kementerian PAN dan RB tahun 2020. Prestasi ini menjadi pendorong untuk terus menguatkan Zona Integritas Reformasi Birokrasi dan melakukan perbaikan berkelanjutan untuk mengoptimalkan kinerja dalam melayani masyarakat melalui berbagai kegiatan diantaranya Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan SNI ISO 37001:2016. Sosialisasi ini dilaksanakan secara daring pada Kamis, 2 Juni 2022 dihadiri oleh seluruh pegawai Balai Besar POM di Jakarta dengan narasumber Auditor SNI ISO 37001:2016 tersertifikasi, Andra Tetuko. Kegiatan ini merupakan langkah awal dari rangkaian kegiatan pendampingan implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) yang akan dilanjutkan dengan dokumentasi, audit internal dan sertifikasi yang diperkirakan selesai pada Oktober 2022 untuk memperkuat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.

5. Perkuatan Koordinasi Lintas Sektor Dalam Penyelesaian Masalah Zonasi Bagi UMKM

Untuk mengatasi permasalahan zonasi kosmetika tersebut pada tanggal 3 Juni 2022 dilakukanlah koordinasi pemecahan masalah oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan mengundang Direktorat Pengawasan Kosmetika Badan POM Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usha Badan POM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Propinsi DKI Jakarta, Dinas Dinas Cipta Karya, Tata Ruang Dan Pertanahan Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Biro Hukum Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

Pada pembahasan tersebut didapatlah 2 rekomendasi untuk tindaklanjut pada revisi peraturan tentang zonasi untuk sarana produksi kosmetika pada Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Propinsi DKI Jakarta dan pemecahan permasalahan pengurusan SIPA penanggungjawab teknis pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Pemerintah Propinsi DKI Jakarta.

6. Bimbingan Teknis Bagi UMKM Pangan Olahan Fasilitas Tahun 2022

Fasilitasi UMKM merupakan program unggulan Badan POM. Beberapa Rangkaian kegiatan dilakukan untuk menunjang program tersebut. Salah satu rangkaian kegiatannya adalah Bimbingan Teknis Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB). Melalui penyelenggaraan Bimbingan Teknis, Badan POM melakukan pendekatan pelayanan kepada UMKM Pangan Olahan yang dapat ditingkatkan dari Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) menjadi pengusaha yang telah mempunyai sarana untuk memproduksi Makanan Dalam (MD) dan mampu memfasilitasi UMKM Pangan Olahan yang belum ada izin edar untuk mengurus izin

edar baik PIRT maupun MD. BBPOM di Jakarta akan terus mendorong UMKM untuk terus berkembang karena memiliki dampak positif pada perekonomian. Diharapkan pada tahun 2022 ini, akan lebih banyak lagi produk-produk UMKM yang bisa mendapatkan izin edar di Badan POM.

7. Balai Besar POM di Jakarta Sita Kosmetik Ilegal Beromzet Miliaran Rupiah Yang Dijual Secara Online

Pelaksanaan pemusnahan yang bertempat di Kabupaten Tangerang, Banten ini dipimpin oleh Plh. Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Evi Citraprianti, S.Si, Apt. dan dihadiri oleh perwakilan dari Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan Badan POM, Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kejaksaan Negeri Jakarta Timur.

Barang bukti berupa Obat dan Makanan ilegal yang dimusnahkan merupakan hasil penindakan Balai Besar POM di Jakarta terhadap perkara yang terjadi pada rentang waktu tahun 2017 hingga 2021 dan telah memiliki Ketetapan. Jumlah produk yang dimusnahkan sejumlah 264.241 pcs dengan perkiraan total nilai keekonomian barang tersebut mencapai hampir 14 Miliar rupiah. Barang bukti tersebut berupa obat yang diedarkan tanpa keahlian dan kewenangan (TKK), obat tradisional mengandung bahan kimia obat (BKO), pangan Tanpa Ijin edar (TIE), kosmetika TIE, dan suplemen TIE. Pemusnahan dilakukan secara simbolis untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pihak ke-3 penyedia jasa pemusnahan limbah bahan berbahaya dan beracun.

8. Berdayakan Pedagang Pasar Lenteng Agung Menuju Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, BBPOM di Jakarta Melaksanakan Penyuluhan Pedagang Pasar Bersama Komisi IX DPR RI

Acara dibuka oleh Kepala Balai Besar POM di Jakarta, Dra. Susan Gracia Arpan, M.Si., Apt, dalam sambutannya Kepala Balai Besar POM di Jakarta menyampaikan pasar - pasar yang sudah diintervensi sejak tahun 2013 dan harapannya agar pedagang pasar dapat meningkatkan kepedulian dan pengetahuannya tentang keamanan pangan sehingga dapat menjual produk pangan yang aman dari bahan berbahaya. Anggota Komisi IX DPR RI Ibu DR. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si juga turut memberikan arahan kepada para pedagang, dalam hal ini beliau menyampaikan pentingnya peran pedagang dalam menyediakan pangan yang aman, bagi masyarakat. Kepala Pasar lenteng Agung juga menyatakan dukungannya terhadap rangkaian kegiatan Pasar pangan Aman berbasis Komunitas yang diselenggarakan oleh BBPOM di Jakarta dan diharapkan pedagang dapat memahami dan menyediakan pangan aman. Materi pada acara penyuluhan kali ini disampaikan oleh Koordinator Kelompok Substansi Informasi dan komunikasi Yayan Cahyani, SSi, Apt meliputi Keamanan Pangan, Cek KLIK dan Cara Ritel Pangan yang Baik di Pasar.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ikhtisar Eksekutif	iii
Highlight Kinerja	v
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	x
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xv
Bab I Latar Belakang	1
1.1 Gambaran Umum Organisasi	2
1.2 Struktur Organisasi	3
1.3 Isu Strategis	3
Bab II Perencanaan Kinerja	5
2.1 Uraian Singkat Rencana Strategis	5
2.2 Rencana Kerja Tahun 2022	9
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun	11
2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja	14
2.5 Metode Pengukuran	17
Bab III Akuntabilitas Kinerja	18
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	18
3.2 Realisasi Anggaran	93
3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan	94
Bab 4 Penutup	97
4.1 Kesimpulan	97
4.2 Saran	97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Analisis Beban Kerja Balai Besar POM di Jakarta	3
Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024	7
Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta TA 2022	9
Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022.....	11
Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022	14
Tabel 6. Kriteria pencapaian kinerja	17
Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis triwulan II Tahun 2022	18
Tabel 8. Hasil Pencapaian indikator kinerja	19
Tabel 9. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat.....	22
Tabel 10. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat.....	25
Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil Pengawasan	28
Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.....	30
Tabel 13. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.....	33
Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.....	36
Tabel 15. Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	37
Tabel 16. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022.....	38
Tabel 17. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	39
Tabel 18. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan TW II tahun 2022	40
Tabel 19. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	43
Tabel 20. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu TW II tahun 2022	46
Tabel 21. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.....	50
Tabel 22. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan	54
Tabel 23. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2022	58
Tabel 24. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	58
Tabel 25. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di wilayah	

kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022	61
Tabel 26. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	64
Tabel 27. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2022	66
Tabel 28. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022.....	69
Tabel 29. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022	71
Tabel 30. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022.....	74
Tabel 31. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022.....	76
Tabel 32. Realisasi Indeks RB BB/BPOM tahun 2022	79
Tabel 33. Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022	81
Tabel 34. Kategori Penilaian SAKIP	82
Tabel 35. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022....	83
Tabel 36. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022	84
Tabel 37. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2022.....	85
Tabel 38. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta TW II tahun 2022.....	89

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Besar POM di Jakarta	3
Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta	4
Gambar 3. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta	6
Gambar 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta	9
Gambar 5. Perbandingan target dan realisasi TW II	23
Gambar 6. Perbandingan target dan realisasi TW II	26
Gambar 7. Perbandingan target dan realisasi TW II	28
Gambar 8. Perbandingan target dan realisasi TW II	31
Gambar 9. Perbandingan target dan realisasi TW II	34
Gambar 10. Perbandingan target dan realisasi TW II	40
Gambar 11. Perbandingan target dan realisasi TW II	42
Gambar 12. Perbandingan target dan realisasi TW II	45
Gambar 13. Perbandingan target dan realisasi TW II	49
Gambar 14. Perbandingan target dan realisasi TW II	52
Gambar 15. Perbandingan target dan realisasi TW II	55
Gambar 16. Perbandingan target dan realisasi TW II	58
Gambar 17. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat	59
Gambar 18. Perbandingan target dan realisasi TW II	61
Gambar 19. Perbandingan target dan realisasi TW II	63
Gambar 20. Perbandingan target dan realisasi TW II	65
Gambar 21. Perbandingan target dan realisasi TW II	67
Gambar 22. Perbandingan target dan realisasi TW II	69
Gambar 23. Perbandingan target dan realisasi TW II	72
Gambar 24. Perbandingan target dan realisasi TW II	80
Gambar 25. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	83
Gambar 26. Nilai EKA BBPOM Jakarta per 30 Juni 2022 pada aplikasi SMART	84
Gambar 29. Perbandingan pagu, realisasi anggaran, dan capaian realisasi anggaran BBPOM di Jakarta Triwulan II Tahun 2022	87

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	90
Lampiran 2	94
Lampiran 3	96

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan bagian integral dari upaya pembangunan kesehatan di Indonesia. Dalam melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan, Badan POM melaksanakan sistem pengawasan *full spectrum* mulai dari *pre-market* hingga *post-market control* yang disertai dengan upaya penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*). Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan POM tidak bertindak sebagai *single player*. Kerjasama dengan berbagai lintas sektor terutama pemerintah daerah diperlukan untuk memperluas cakupan pengawasan obat dan makanan. Menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), Badan POM mengubah paradigma pengawasan dari *watchdog control* menjadi *proactive control*, dengan mendorong penerapan *Risk Management Programme*.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM melaksanakan kegiatan utama berdasarkan bisnis proses yang telah ditetapkan dalam Dokumen Rencana Strategis periode 2020-2024 yaitu melaksanakan program pengawasan Obat dan Makanan (*post-market*) di seluruh wilayah administratif Provinsi DKI Jakarta meliputi pengawasan sarana produksi, sarana distribusi sesuai standar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *sampling* dan pengujian laboratorium terhadap produk Obat dan Makanan serta penyidikan dan penegakan hukum.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai UPT Badan POM, mempunyai 4 (empat) inti kegiatan atau pilar lembaga, yaitu:

1. Penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (*pre-market*) terlibat dalam registrasi/penilaian, inspeksi sarana produksi dalam rangka sertifikasi;
2. Pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (*post-market*) mencakup: *sampling* dan pengujian, inspeksi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan di Provinsi DKI Jakarta;
3. Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi informasi dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk. Selain itu melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan lintas sektor untuk penguatan kerjasama kemitraan dengan pemangku kepentingan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan;
4. Penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Besar POM di Jakarta dalam upaya penguatan pelaksanaan kebijakan pengawasan Obat dan Makanan perlu didukung dengan peningkatan kerjasama, komunikasi, informasi dan edukasi dengan pemangku kepentingan

sehingga dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan kesehatan masyarakat dengan memberikan perlindungan terhadap produk-produk Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta mendorong pelaku usaha dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan mampu menerapkan kaidah-kaidah cara produksi yang baik dan cara distribusi yang baik sehingga produk Obat dan Makanan yang beredar di masyarakat memenuhi aspek keamanan, mutu maupun kemanfaatannya.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Tugas

Melaksanakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Fungsi

- a. penyusunan rencana dan program di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
- e. pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan
- g. pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan
- h. pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
- i. pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber
- j. pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- k. pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

b. Lingkungan Eksternal

1. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi DKI Jakarta terletak pada 6°12' Lintang Selatan dan 106°48' Lintang Selatan. Wilayah Provinsi DKI Jakarta seluas 662,33 km². Cakupan wilayah kerja Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 6 Kabupaten/Kota terdiri dari 1 Kabupaten dan 5 Kota dengan jumlah penduduk 10,6 juta jiwa.



Gambar 2. Wilayah Kerja Balai Besar POM di Jakarta

2. Sarana Produksi dan Distribusi yang Diawasi

Produk Obat dan Makanan yang diawasi di wilayah Provinsi DKI Jakarta meliputi industri farmasi, unit tranfusi darah, industri obat tradisional, industri kecil obat tradisional, industri kosmetik, industri pangan serta industri rumah tangga pangan. Sedangkan sarana distribusi meliputi Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Toko Obat, Gudang Farmasi Kab/Kota, RS pemerintah dan swasta, Puskesmas, Balai Pengobatan, sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, pangan serta bahan berbahaya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Rencana Strategis

Dengan mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, potensi, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka Balai Besar POM di Jakarta sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai lembaga yang melakukan pengawasan Obat dan Makanan dituntut untuk dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menjaga keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu Obat dan Makanan.

Balai Besar POM di Jakarta sebagai Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan pengawasan Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta menetapkan visi, misi dan tujuan serta sasaran.

Sejalan dengan visi dan misi pembangunan dalam RPJMN 2020-2024, maka segenap jajaran Badan POM termasuk Balai Besar POM di Jakarta bercita-cita mewujudkan Visi BPOM 2020-2024 yaitu: "Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong".

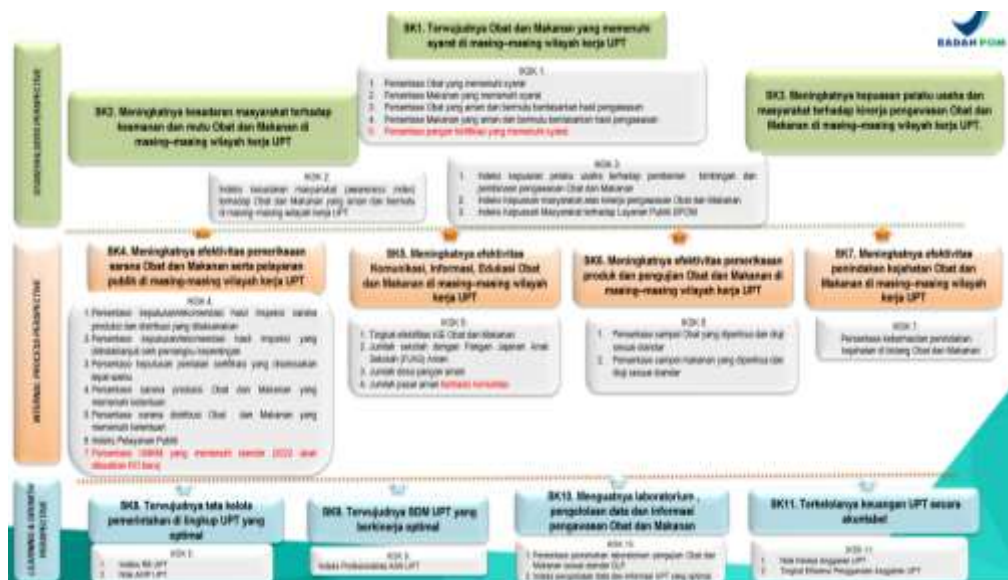
Untuk mewujudkan visi tersebut, telah ditetapkan Misi Balai Besar POM di Jakarta mengacu pada Misi BPOM sebagai berikut:

1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa, dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan

Dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi pengawasan Obat dan Makanan, maka tujuan pengawasan Obat dan Makanan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 adalah:

- 1) Meningkatnya peran serta masyarakat dan lintas sektor dalam Pengawasan Obat dan Makanan.
- 2) Meningkatnya kapasitas SDM Balai Besar POM di Jakarta dan pemangku kepentingan, kualitas pengujian laboratorium, analisis/kajian kebijakan, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan Obat dan Makanan.
- 3) Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Obat dan Makanan serta kemandirian bangsa dengan keberpihakan pada UMKM.
- 4) Menguatnya fungsi pengawasan yang efektif untuk memastikan obat dan makanan yang aman dan bermutu.
- 5) Terwujudnya kepastian hukum bagi pelaku usaha Obat dan Makanan.
- 6) Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Obat dan Makanan.
- 7) Terwujudnya kelembagaan Pengawasan Obat dan Makanan yang kredibel dan akuntabel dalam memberikan pelayanan publik yang prima.

Berdasarkan pertimbangan dari 4 (empat) perspektif dalam pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) meliputi *Learning & Growth*, *Internal Process*, *Customer* dan *Stakeholders* maka sasaran strategis dalam periode waktu 2020-2024 dapat dilihat pada peta strategi level II Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:



Gambar 3. Peta Strategi BSC Level II Balai Besar POM di Jakarta

Sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta ini disusun berdasarkan sasaran strategis pada peta strategi level 0 Kepala BPOM yang menggambarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta

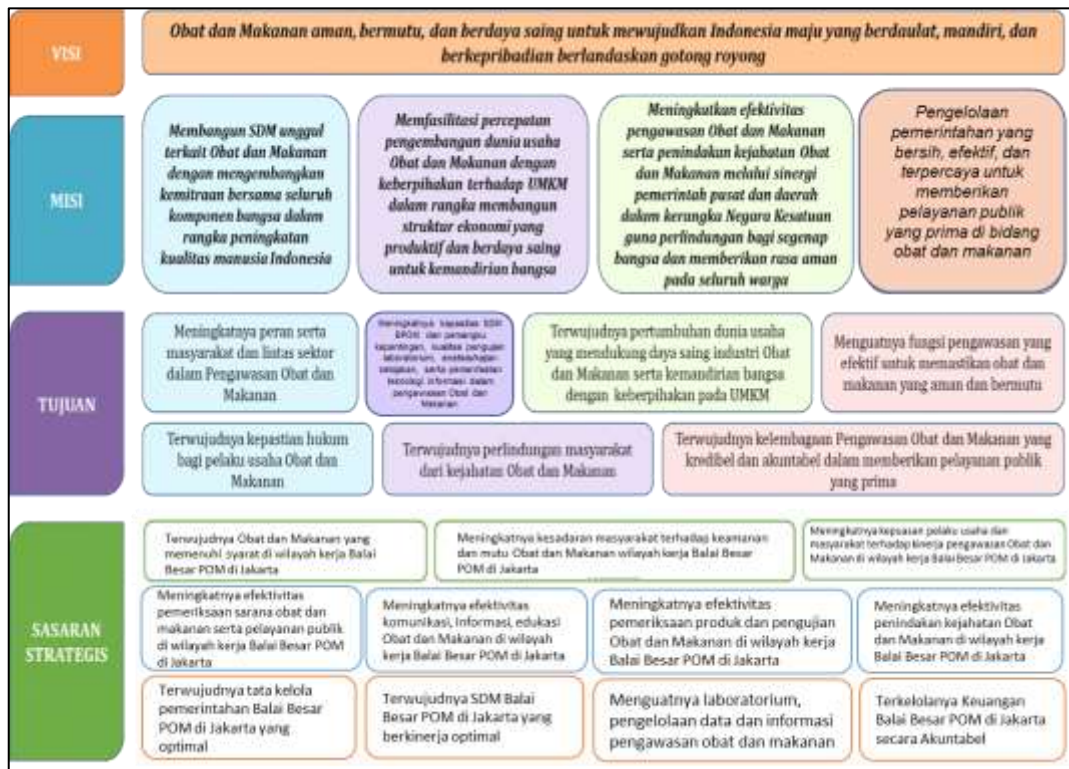
infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai Besar POM di Jakarta akan dapat mencapai sasaran strategis di Wilayah Provinsi DKI Jakarta sehingga dapat mendukung tercapainya sasaran strategis BPOM secara Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2021 menetapkan 11 (sebelas) sasaran strategis dengan 29 (dua puluh sembilan) indikator yang dilengkapi dengan target kinerja. Perubahan sasaran strategis, indikator dan target kinerja Balai Besar POM di Jakarta tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja 2020-2024

Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
Stakeholder						
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	86	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	78	95	95.5	96	96.5
	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	86	80	81	82	83
	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78	81	83	84	86
	Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	-	88	89	90	90
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	75	85	87	89	91
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	82	86.6	87.7	88.8	89.9
	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	72	74.98	76.65	78.33	80.01
	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	88,5	90	91	92	93
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87	89	90	91	93
	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	55,5	75	79	82	85
	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	83	85	87	89	91
	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	46	60	63	65	70
	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55	73	75	78	80

Sasaran strategis	Indikator	Target Kinerja				
		2020	2021	2022	2023	2024
	Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	3,51	4.20	4,3	4,4	4,51
	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	-	-	77	79	81
Internal Process						
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	70	93	94.4	95.8	97.3
	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	20	40	65	90	115
	Jumlah desa pangan aman	7	14	21	28	36
	Jumlah pasar aman berbasis komunitas	1	2	3	4	6
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	90	100	100	100	100
	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	89	100	100	100	100
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	32	54	58	61	65
Learning and Growth						
Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	88	82.4	83.4	84.4	85.4
	Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	81	79.1	80	81	82
Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	75	84.25	84.5	84.75	85
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	77	82	87	92
	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	1,51	2	2,25	2,5	3
Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	93	91.9	92.5	93.7	94.9

Dengan memperhatikan prioritas pembangunan RPJMN 2020-2024, maka kedudukan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis (versi renja) dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 4. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis Balai Besar POM di Jakarta

Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (periode 2020-2024) diharapkan Balai Besar POM di Jakarta mampu mencapai sasaran strategis secara efektif dan efisien sehingga memberikan kontribusi positif dalam dimensi pembangunan manusia seiring dengan proses revolusi mental sehingga mampu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia serta mengembangkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya, dengan penjabaran masing-masing Sasaran Strategis.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2022

Perencanaan kinerja Balai Besar POM di Jakarta terdapat dalam Dokumen Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta tahun 2020-2024 yang ditetapkan dalam SK Kepala Balai Besar POM di Jakarta pada tahun 2020.

Tabel 3. Rencana Kinerja Balai Besar POM di Jakarta TA 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat 02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat 03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan 04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81 95,5 81 83

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
2.	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87
3.	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7
08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan		76,65	
09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM		91	
4.	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
		11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,30
		16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
5.	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
		18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65
		19-Jumlah desa pangan aman	21
		20-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3
6.	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
		22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
7.	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
8.	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4
		25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80
9.	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5
10.	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
		28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25
11.	11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Balai Besar POM di Jakarta menandatangani Perjanjian Kinerja untuk mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024 dan DIPA Balai Besar POM di Jakarta Tahun Anggaran 2021 dengan jumlah anggaran sebesar Rp 41.686.698.000,- (empat puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah). Perjanjian Kinerja memuat sasaran strategis yang seharusnya terwujud pada tahun 2021 dengan indikator kinerja yang relevan dengan sasaran atau kondisi yang ingin diwujudkan serta target kinerja yang akan dicapai atau seharusnya dicapai oleh Balai Besar POM di Jakarta, sebagai berikut:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS (2)	INDIKATOR KINERJA (3)	TARGET (4)
01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
	02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5
	03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
	04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
	05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89
02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87
03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7
	08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65
	09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91
04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90
	11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
	12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
	13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(2)	(3)	(4)
	14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
	15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,30
	16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4
	18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65
	19-Jumlah desa pangan aman	21
	20-Jumlah pasar aman berbasis komunitas	3
06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
	22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4
	25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80
09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5
10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
	28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25
11-Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5

Penetapan target Perjanjian Kinerja tahun 2020 pada sasaran program berdasarkan Renstra tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan berdasarkan tren data capaian periode Renstra tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 53 tahun 2014, maka Balai Besar POM di Jakarta sebagai unit kerja Eselon II wajib menyusun Perjanjian Kinerja sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah (Kepala Balai Besar POM di Jakarta) dengan pemberi amanah (Kepala BPOM RI) untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur. Pengukuran akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Perjanjian kinerja akan dimanfaatkan oleh setiap pimpinan untuk memantau dan mengendalikan pencapaian kinerja organisasi, melaporkan capaian kinerja dalam laporan kinerja, serta sebagai acuan target dalam menilai keberhasilan organisasi dan digunakan sebagai bahan evaluasi perbaikan periode berikutnya.

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Tabel 5. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81%	81%	81%	81%	465.152.450
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5%	95,5%	95,5%	95,5%	298.193.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81%	81%	81%	81%	465.152.450
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83%	83%	83%	83%	298.193.000
		Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89%	89%	89%	89%	50.898.400
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu				87	318.225.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan				87,7	46.325.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan				76,65	371.262.500
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				91	82.596.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90%	90%	90%	90%	396.496.750
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79%	79%	79%	79%	396.496.750
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87%	87%	87%	87%	295.830.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63%	63%	63%	63%	160.788.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75%	75%	75%	75%	632.205.500
		Indeks Pelayanan Publik Balai Besar POM di Jakarta				4,30	371.262.500
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik				77	85.159.900
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,4	94,4	2.603.617.000
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	30% (progress)	70% (progress)	90% (progress)	65	767.240.000
		Jumlah desa pangan aman	25% (progress)	40% (progress)	65% (progress)	21	1.097.149.000
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	25% (progress)	70% (progress)	70% (progress)	3	110.081.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar				100%	398.702.100
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	10%	40%	70%	100%	277.407.600
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	10%	30%	45%	58%	1.444.888.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta				83.4	91.936.000
		Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta				80	54.154.000
9	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta				84.5	27.090.178.000
10	Menguatnya laboratorium. pengelolaan data dan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar <i>GLP</i>				82	6.770.065.000

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target				Anggaran
			B03	B06	B09	B12	(Rupiah)
	informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	137.915.000
11	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	77	80	86	92,5	28.600.000

2.5. Metode Pengukuran

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja adalah tim monitoring dan evaluasi yang terkait dengan indikator tersebut.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Kriteria pencapaian kinerja

Kriteria	Capaian	Keterangan
Tidak dapat disimpulkan	$x > 120\%$	
Sangat Baik	$110\% < x \leq 120\%$	
Baik	$90\% \leq x < 110\%$	
Cukup	$70\% \leq x < 90\%$	
Kurang	$50\% \leq x < 70\%$	
Sangat Kurang	$< 50\%$	

Penetapan ini bertujuan untuk:

1. Mencegah penetapan target kinerja tahunan yang rendah.
2. Pemanfaatan monitoring kinerja secara berkala yang merupakan penerapan SAKIP sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

1.3. Capaian Kinerja Organisasi

Pada bagian Capaian Kinerja Organisasi disajikan hasil pengukuran kinerja dari masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis Balai Besar POM di Jakarta guna memberikan gambaran lebih lanjut tentang efisiensi dan efektifitas kegiatan yang dilaksanakan pada tahun berjalan. Perhitungan/ pengukuran kinerja perlu dilakukan

Tabel 7. Pencapaian Sasaran Strategis triwulan II Tahun 2022

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN (NPS)	KRITERIA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	92,85	BAIK
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	-	-
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	-	-
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	100,08	BAIK
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	105,02	BAIK
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	117,83	SANGAT BAIK
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	105,56	BAIK
8.	Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	-	-
9.	Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	-	-
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	97,78	BAIK
11.	Terkelolanya Keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	94,81	BAIK

Pada Rencana Strategis Balai Besar POM di Jakarta telah ditetapkan 11 sasaran strategis dan 29 indikator kinerja dengan pencapaian sebagai berikut:

Tabel 8. Hasil Pencapaian indikator kinerja

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume				Kriteria	Target Pagu	Realisasi Pagu
			Target Tahun 2022	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan (%)			
a	b	c	d	f	g	$h=(g/f*100)$	i	j	k
1	01-Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	01-Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81,00	71,95	88,83	CUKUP	465.152.450	46.016.473
		02-Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5	95,50	96,72	101,28	BAIK	298.193.000	11.757.085
		03-Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81,00	62,44	77,09	CUKUP	465.152.450	46.016.473
		04-Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83,00	86,15	103,80	BAIK	298.193.000	11.757.085
		05-Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89,00	82,98	93,23	BAIK	18.662.000	3.666.950
2	02-Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	06-Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	87		-	-		195.651.000	21.696.978
3	03-Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	07-Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,7		-	-		46.325.000	0
		08-Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65		-	-		228.259.500	25.313.141
		09-Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91		-	-		82.596.000	0
4	04-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan	10-Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90,00	91,49	101,66	BAIK	356.369.750	19.512.503

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume				Kriteria	Target Pagu	Realisasi Pagu
			Target Tahun 2022	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan (%)			
a	b	c	d	f	g	$h=(g/f*100)$	i	j	k
	publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	11-Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79,00	77,42	98,00	BAIK	356.369.750	19.512.503
		12-Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87,00	94,70	108,85	BAIK	295.830.000	5.540.000
		13-Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63,00	79,86	126,76	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	137.852.000	12.639.130
		14-Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75,00	83,07	110,76	SANGAT BAIK	574.887.500	26.385.876
		15-Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	4,3		0	0		228.259.500	25.313.141
		16- Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77	36,67	56,67	154,53	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	85.159.000	0
5	05-Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	17-Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,40	94,82	100,44	BAIK	2.603.617.000	249.427.541
		18-Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65	70 (progress)	70 (progress)	100,00	BAIK	720.402.000	19.140.000
		19-Jumlah desa pangan aman	21	40 (progress)	45 (progress)	112,5	SANGAT BAIK	1.046.723.000	63.735.000
		20-Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3	70 (progress)	75 (progress)	107,14	BAIK	110.081.000	15.950.000
6	06-Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan	21-Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	40	50,45	126,11	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN	398.702.100	39.442.691

No	Sasaran Strategis	Nama Indikator	Volume				Kriteria	Target Pagu	Realisasi Pagu
			Target Tahun 2022	Target Triwulan II	Realisasi Triwulan II	Capaian Triwulan (%)			
a	b	c	d	f	g	$h=(g/f*100)$	i	j	k
	pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	22-Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100	40	43,82	109,55	BAIK	263.592.000	11.649.051
7	07-Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta	23-Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58	30	31,67	105,57	BAIK	1.416.068.000	58.076.388
8	08-Terwujudnya tatakelola pemerintahan Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	24-Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	83,4	-	-	-	-	119.866.000	15.210.500
		25-Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	80	-	-	-	-	30.724.000	5.838.000
9	09-Terwujudnya SDM Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal	26-Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	84,5	-	-	-	-	25.855.724.000	7.855.394.477
10	10-Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27-Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82	-	-	-	-	5.825.243.000	1.550.324.565
		28-Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,25	2,2000	97,78	BAIK	137.915.000	131.146.000
11	11-Terkelolanya Keuangan UPT Balai Besar POM di Jakarta secara Akuntabel	29-Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	92,5	80	75,85	94,81	BAIK	2.944.600.000	183.300.000

Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, terdapat 13 (tiga belas) indikator mencapai target dengan kriteria "BAIK", 2 (dua) indikator mencapai target dengan kategori "CUKUP", 2 (dua) indikator mempunyai capaian lebih dari 120% dengan kategori "TIDAK DAPAT DISIMPULKAN" target dengan 2 (dua) indikator mencapai kategori "SANGAT BAIK".

Kriteria baik menunjukkan bahwa penguatan pengawasan Obat dan Makanan menjadi komitmen utama harus terus dipertahankan dan diperkuat secara optimal sehingga produk-produk obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan di Provinsi DKI Jakarta tetap terjamin aman, bermanfaat/berkhasiat dan bermutu untuk dikonsumsi oleh masyarakat.

Sasaran Strategis-1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

1. Persentase Obat yang memenuhi syarat

a. *Perbandingan target dan realisasi triwulan II dengan tahun 2022*

Tabel 9. Realisasi Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	71,95	88,83	88,83	CUKUP

Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik (Perpres 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja).

Sampling dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi :

No	Kriteria
1	Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
2	Produk kadaluarsa
3	Produk rusak
4	Tidak memenuhi ketentuan penandaan
5	Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets. Jika termasuk poin 1 atau 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (poin 4), maka sampel tetap diuji.

Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/kedaluwarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS

Persentase obat yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

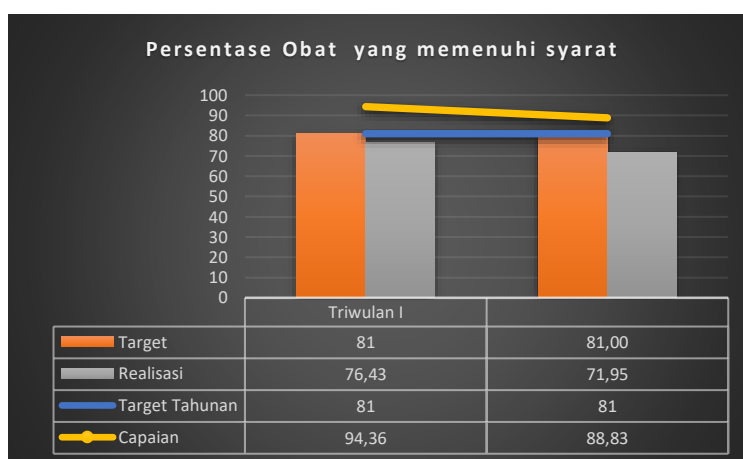
$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

Keterangan:

- a) Diperiksa meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label,
- b) Diuji meliputi pengujian di laboratorium.
- c) Pembilang dan penyebut untuk penghitungan realisasi pada bulan n, merupakan akumulasi sampel sampai dengan bulan n.
- d) Sampel yang di sampling di wilayah Loka akan menjadi kinerja Loka meskipun Loka tersebut tidak melakukan pengujian.
- e) Dalam pengambilan kesimpulan, Loka yang tidak melakukan pengujian dapat menggunakan hasil uji dari Balai Penguji untuk poin 5.

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II tahun 2022

Capaian Persentase Obat yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta sampai dengan triwulan II tahun 2022 yaitu 88,83% dengan kriteria **“Cukup”**. Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi penurunan capaian sebanyak 5,53 poin.



Gambar 5. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Belum tercapainya target indikator kinerja TW II tahun 2022 dipengaruhi oleh banyaknya sampel kosmetik hasil sampling acak yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga menyebabkan persentase obat yang memenuhi syarat sangat rendah.

Dari 797 sampel acak yang masuk laboratorium, 713 sampel sudah selesai diuji (89,46%), namun yang memenuhi syarat sebesar 513 sampel (71,95%).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Intervensi pengawasan juga dilakukan terhadap industri komoditi lainnya untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) agar produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Seperti halnya industri farmasi, industri kosmetik dan obat tradisional pun harus membuat CAPA jika ada ketidaksesuaian terhadap pemenuhan CPKB / CPOTB dan juga dilakukan monitoring secara berkesinambungan untuk menjamin mutu produk yang diproduksi memenuhi standar (secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasinya).
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Hal ini akan menimbulkan efek jera pada pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi temuan pelanggaran.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta agar mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman bagi kesehatan.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi

Tindak lanjut dari rekomendasi periode sebelumnya yaitu pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin mengadakan Bimbingan Teknis untuk para pelaku usaha. Namun dengan adanya relaksasi dalam evaluasi

pre market, khususnya untuk kosmetik yang pendaftarannya hanya melalui notifikasi, hal ini menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya mengurangi jumlah produk yang tidak memenuhi ketentuan.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan II dengan tahun 2022*

Tabel 10. Realisasi Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5	95,5	96,72	101,28	101,28	BAIK

Yang dimaksud dengan Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Sampling dilakukan terhadap Pangan Olahan beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar dan kerangka sampling acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling.

Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:

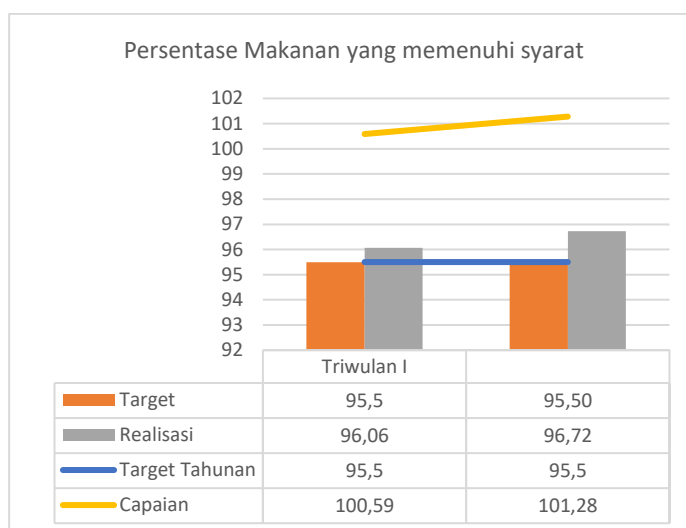
- 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar)
- 2) Produk kadaluarsa
- 3) Produk rusak
- 4) Tidak memenuhi ketentuan label
- 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Alur pemeriksaan hasil sampling Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5. Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Jika termasuk poin 1, 2 atau 3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/kadaluarsa atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS, kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Acak MS}}{\text{Sampel Acak yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II tahun 2022



Gambar 6. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Persentase Capaian dan Realisasi Makanan yang memenuhi syarat di Provinsi DKI Jakarta di Triwulan II tahun 2022 sebesar 101,28 % dengan kriteria “**Baik**”. Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi peningkatan capaian sebanyak 0,69 poin.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Capaian indikator kinerja persentase makanan yang memenuhi syarat berada diatas target TW II tahun 2022 yaitu 101.28% dengan kriteria “Baik”.
- Persentase realisasi makanan yang memenuhi syarat diatas persentase target tahunan dan TW II Tahun 2022 yaitu 96.72%. Meningkatnya persentase realisasi makanan yang memenuhi syarat didorong dengan meningkatnya jumlah sampel makanan yang memenuhi syarat pada TW II. Dari 335 sampel makanan yang masuk ke laboratorium sebanyak 244 sampel telah selesai uji (72.84%), sebanyak 236 sampel makanan memenuhi syarat uji (96,72%) dan 8 sampel tidak memenuhi syarat.
- Persentase Capaian dan Realisasi sampel makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II meningkat dibandingkan dengan capaian dan realisasi di Triwulan I di tahun 2022, juga di atas target Tahun 2022 yang ditetapkan yaitu 95.50%. Hal ini menunjukkan bahwa produk pangan yang beredar di masyarakat sebagian besar adalah produk yang memenuhi syarat.
- Beberapa produk manisan buah kering dan makanan ringan non ekstrudat yang tidak memenuhi syarat beredar di masyarakat pada tahun ini maupun pada tahun 2021 memerlukan pengawasan khusus agar tidak ada lagi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat di masyarakat.

- Realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2022 di atas target yang ditetapkan, dengan kriteria baik. Meskipun realisasi persentase makanan yang memenuhi syarat sudah di atas target, namun masih ada produk yang TMK Major yaitu TMS Label/Penandaan.

Beberapa hal yang mendukung capaian pangan yang memenuhi syarat, antara lain:

- Pengawasan premarket dan post-market yang komprehensif, profesional dan independen akan menghasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu
- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri pangan untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi yang Baik (GMP) sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan GMP maka industri wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin pangan yang diproduksi memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia terkait temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan menjadi lebih luas.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Pangan kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta guna memberdayakan masyarakat agar cerdas dalam memilih produk yang berkualitas dan aman bagi kesehatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan, penyidikan, KIE serta peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar / Balai POM seluruh Indonesia sebagaimana yang dijelaskan pada butir b di atas, jika dilaksanakan secara maksimal dan terus menerus akan dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Namun jika pelaksanaannya kurang intensif, dapat menyebabkan tidak tercapainya target kinerja.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

- Peningkatan koordinasi dengan tim Pemeriksaan dan Infokom terkait dengan temuan produk pangan TMS (tidak memenuhi syarat) pengujian maupun TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan untuk produksi Industri di luar DKI Jakarta agar dapat dilakukan pembimbingan dan

diawasi secara rutin dan terus menerus ke produsen sehingga produk pangan yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya.

- Melakukan evaluasi pengawasan melalui sampling dan pengujian secara berkala terhadap produsen-produsen yang produk pangannya TMS pengujian maupun TMK yang telah dibimbing.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

a. *Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan II dengan tahun 2022*

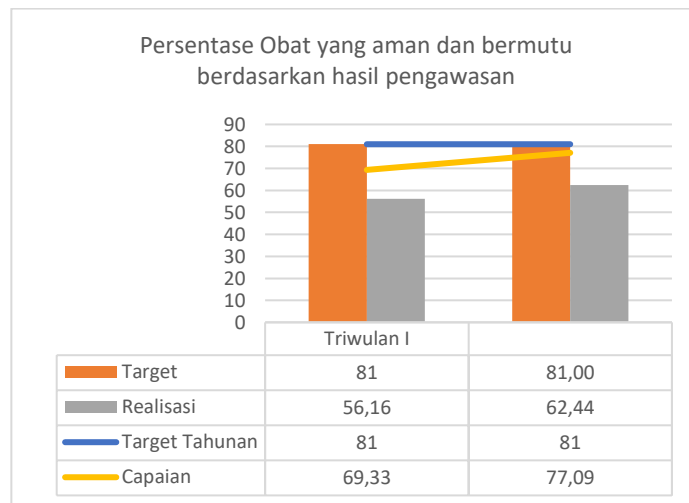
Tabel 11. Realisasi Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	62,44	77,09	77,09	CUKUP

Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Obat MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

b. *Perbandingan Realisasi dan Capaian TW II Tahun 2022*



Gambar 7. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Persentase capaian Triwulan II tahun 2022 sebesar 77,09 % dengan kriteria “Cukup”. Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi peningkatan capaian sebanyak 7,76 poin.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Rendahnya capaian indikator kinerja TW II tahun 2022 tersebut dipengaruhi oleh banyaknya sampel kosmetik hasil sampling targeted yang tidak memenuhi ketentuan penandaan, sehingga menyebabkan persentase obat yang memenuhi syarat sangat rendah. Selain itu terdapat beberapa sampel obat tradisional tidak memenuhi syarat uji, produksi dari produsen dengan Riwayat TMS. Dari 258 sampel targeted yang masuk laboratorium, yang sudah selesai diuji sebanyak 213 sampel (82.56%) namun yang memenuhi syarat hanya sebanyak 133 sampel (62,44%).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Intervensi pengawasan yang dilakukan secara rutin dan terus-menerus kepada industri farmasi untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Obat yang Baik (CPOB), sehingga produk obat yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Apabila industri farmasi melakukan pelanggaran terhadap pemenuhan CPOB maka industri farmasi wajib membuat Corrective Action Preventive Action (CAPA) dan dilakukan monitoring secara berkesinambungan sehingga menjamin obat yang diproduksi memenuhi standar, baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.
- Intervensi pengawasan juga dilakukan terhadap industri komoditi lainnya untuk pemenuhan penerapan Cara Produksi Kosmetik yang Baik (CPKB) atau Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) agar produk yang dihasilkan memenuhi standar termasuk aspek kesesuaian penandaannya. Seperti halnya industri farmasi, industri kosmetik dan obat tradisional pun harus membuat CAPA jika ada ketidaksesuaian terhadap pemenuhan CPKB / CPOTB dan juga dilakukan monitoring secara berkesinambungan untuk menjamin mutu produk yang diproduksi memenuhi standar (secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasinya).
- Peningkatan koordinasi dengan Badan POM dan Balai Besar POM seluruh Indonesia terkait temuan produk obat TMK (tidak memenuhi ketentuan) penandaan produksi Industri di luar DKI Jakarta.
- Pelaksanaan kegiatan penyidikan selalu ditingkatkan yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi personel, dengan demikian cakupan temuan pelanggaran di bidang obat dan makanan lebih luas. Hal ini akan menimbulkan efek jera pada pelaku usaha, sehingga diharapkan dapat mengurangi temuan pelanggaran.
- Penyuluhan dan penyebaran informasi tentang KIE Keamanan Obat kepada masyarakat di Provinsi DKI Jakarta agar mempunyai kesadaran dan kemampuan untuk memilih produk yang aman bagi Kesehatan.

e. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)**

Tindak lanjut dari rekomendasi periode sebelumnya yaitu pembinaan kepada pelaku usaha untuk selalu memenuhi ketentuan harus terus ditingkatkan terutama untuk pelaku usaha yang bergerak di bidang Kosmetik dan Obat Tradisional. Hal ini pun telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan dengan secara rutin mengadakan Bimbingan Teknis untuk para pelaku usaha. Namun dengan adanya relaksasi dalam evaluasi pre market, khususnya untuk kosmetik yang pendaftarannya hanya melalui notifikasi, hal ini menjadi tantangan yang cukup berat dalam upaya mengurangi jumlah produk yang tidak memenuhi ketentuan.

4. **Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**

a. **Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan II dengan tahun 2022**

Tabel 12. Realisasi Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	86,15	103,08	103,08	BAIK

Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012)

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling Obat dan Makanan, dengan menggunakan sampling targeted / purposive di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling kecuali sampel pangan fortifikasi.

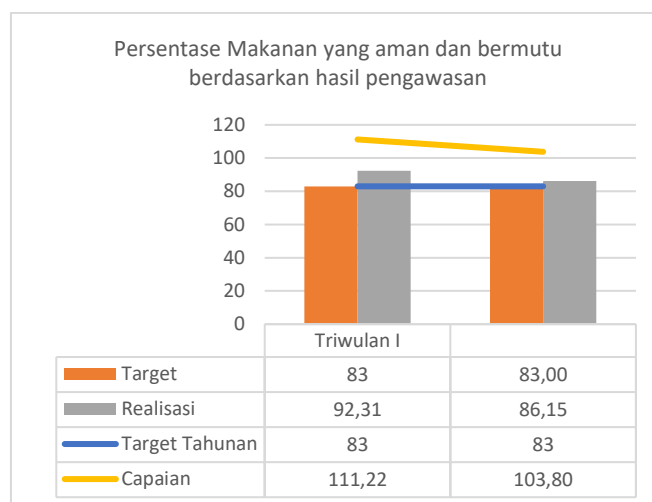
Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian

Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Makanan MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Targeted MS}}{\text{Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II tahun 2022



Gambar 8. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Persentase Capaian dan Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 103,8% dengan kriteria “Baik”. Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi penurunan capaian sebanyak 7,42 poin.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Indikator kinerja utama “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan” merupakan indikator yang ditetapkan di tahun 2020 dan masih digunakan di tahun 2022. Data realisasi tahun 2020 merupakan baseline untuk realisasi tahun-tahun berikutnya. Realisasi persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dihitung berdasarkan hasil pengujian dan evaluasi penandaan sampel makanan yang disampling secara targeted. Persentase capaian dan realisasi sampel makanan yang aman dan bermutu sudah memperhitungkan penandaan label, sampel tanpa ijin edar, kadaluarsa dan rusak.
- Persentase Capaian dan Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Provinsi DKI Jakarta Triwulan II tahun 2022 berturut-turut adalah sebesar 103.8% dan 86.15%, di

atas target Triwulan II dan target tahunan tahun 2022 yang ditetapkan yaitu 83 %, dengan kriteria “Baik”.

- Persentase Capaian dan Realisasi Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di Triwulan II Tahun 2022 menurun dibandingkan dengan persentase capaian dan Realisasi Triwulan I Tahun 2022 (capaian 111.22% dan realisasi 92.31%). Menurunnya realisasi makanan yang aman dan bermutu berdasarkan pengawasan disebabkan meningkatnya jumlah makanan yang tidak memenuhi syarat mikrobiologi dan kimia.
- Pada Triwulan II jumlah sampel pangan targeted yang masuk ke laboratorium sebanyak 72 sampel dan sebanyak 65 sampel makanan (90,28%) telah selesai uji dengan jumlah sampel yang memenuhi syarat sebanyak 56 sampel (86,15%) dan 9 sampel makanan (13,85%) tidak memenuhi syarat. Sampel makanan yang tidak memenuhi syarat meliputi TMS Bisphenol A (2), TMS sulfit (2), TMS E. Coli (1), TMS E.coli dan Coliform (1), TMS APM E.Coli (2), TMS Siklamat (1). Pada Triwulan I Laboratorium Pangan menerima sampel target kasus kemasan pangan dalam jumlah banyak karena hal ini berkaitan dengan wacana BPOM dalam menetapkan regulasi terkait kemasan pangan. Adanya wacana Badan POM terkait dengan regulasi kemasan pangan polikarbonat, menyebabkan pengujian kemasan pangan menjadi perhatian BBPOM di Jakarta, khususnya di Laboratorium pangan, sehingga perlu peningkatan kemampuan uji SDM dan menambah jumlah metoda uji yang akan digunakan

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Proses/Teknik sampling dan kondisi di sarana distribusi dan produsen juga mempengaruhi hasil pengujian di laboratorium. Pada Implementasi Regionalisasi di tahun 2022, Laboratorium Pangan Balai Besar POM Jakarta ditunjuk sebagai Laboratorium Air dan Laboratorium spesifik Mikotoksin. Program perencanaan pengadaan alat, verifikasi metoda Analisa, bimbingan teknis internal dan eksternal, magang dan peningkatan ruang lingkup pengujian laboratorium yang terkait dengan pengujian Regionalisasi menjadi perhatian khusus. Peningkatan sarana, prasarana dan fasilitas tersebut meningkatkan cost / biaya yang dikeluarkan dalam pembelian suku cadang, reagent, dan alat dalam jumlah banyak, sehingga memerlukan perencanaan yang lebih baik.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Penerapan Penerapan sistem manajemen mutu secara konsisten menjadi perhatian utama dalam peningkatan dan monitoring mutu hasil pengujian. Pengembangan metode analisis yang sesuai trend produk yang beredar juga dilakukan secara berkala setiap tahunnya. Pengembangan kompetensi personil baik lama maupun baru dilakukan secara berkala dengan melakukan bimbingan teknis secara internal maupun eksternal. Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji dalam hal kinerjanya juga dilakukan dengan mengikuti uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal.

Cara penyamplingan yang baik dan benar yang disesuaikan dengan prosedur yang telah ditetapkan telah dilakukan oleh Kelompok Substansi Pemeriksaan untuk mendapatkan sampel yang representatif, termasuk

dalam pelaksanaan sampling kemasan pangan untuk mendukung kebijakan regulasi kemasan pangan. Dengan sampling yang baik dan benar diharapkan diperoleh data yang optimal.

Kelompok Substansi Pemeriksaan secara rutin melakukan kegiatan berikut :

Intervensi pengawasan yang dilakukan terhadap sarana produksi makanan untuk meningkatkan kepatuhan produsen terhadap peraturan yang berlaku serta pemenuhan penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), termasuk aspek kesesuaian penandaannya, sehingga produk makanan yang dihasilkan memenuhi standar baik secara kualitas maupun kesesuaian dengan dokumen registrasi.

Melaksanakan bimbingan teknis Iklan dan Penandaan Makanan untuk meningkatkan kemampuan petugas dalam melakukan evaluasi Iklan dan Penandaan sehingga hasil pengawasan iklan dan penandaan dapat sesuai dengan pedoman.

5. **Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta**

a. Matriks Perbandingan target dan realisasi triwulan II dengan tahun 2022

Tabel 13. Realisasi Persentase Pangan Fortifikasi yang memenuhi syarat di wilayah kerja BBPOM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	82,98	93,23	93,23	BAIK

Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat.

Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujiannya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundangundangan.

Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label dan pengujian.

Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi.

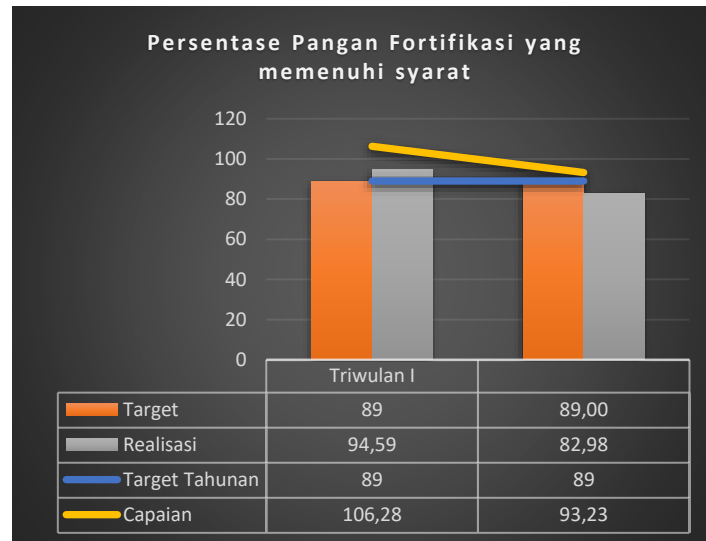
Contoh: Parameter uji garam berdasarkan pedoman sampling adalah penetapan kadar KIO₃, NaCl, cemaran logam Pb dan kadar air. Meskipun yang MS hanya kadar KIO₃ sedangkan semua parameter lain TMS, maka kesimpulan akhir untuk perhitungan IKU ini tetap MS.

Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.

Persentase Pangan Fortifikasi berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta diperoleh dengan rumus:

$$\% \text{ Pangan Fortifikasi MS} = \frac{\text{Jumlah Sampel Pangan Fortifikasi yang MS}}{\text{Total Pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji}} \times 100\%$$

b. Perbandingan Perbandingan realisasi dan capaian tw II tahun 2022



Gambar 9. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Persentase capaian pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Triwulan II tahun 2022 sebesar 93.23%, mengalami penurunan dibandingkan dengan Triwulan I yang mencapai 106.28%. Persentase realisasi pangan fortifikasi yang memenuhi syarat di Triwulan II tahun 2022 sebesar 82.98% hampir mendekati target triwulan II tahun 2022 dan mengalami penurunan dibandingkan dengan persentase realisasi triwulan I tahun 2022 yaitu 94.59%.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan /penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Persentas Pada tahun 2021 ini, IKU “Pangan fortifikasi yang memenuhi syarat” merupakan tambahan IKSK 1 dari SK1 (Terwujudnya obat dan makanan yang memenuhi syarat), dengan memisahkan pangan fortifikasi dari IKU “Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan”.
- Realisasi persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat pada Triwulan II tahun 2022 berada mendekati target yang ditetapkan dan capaian pangan fortifikasi masuk dalam kriteria “baik”. Berdasarkan hasil evaluasi pengujian kimia di TW II, jumlah pangan fortifikasi yang memenuhi syarat sebanyak 78 sampel (82,99%). Produk pangan fortifikasi yang tidak memenuhi syarat sebanyak 16 sampel (17,02%)

yaitu 10 sampel garam dengan parameter yang diuji adalah penetapan kadar KIO₃ dan 6 sampel tepung terigu.

- Kondisi pandemic Covid-19 turut mempengaruhi kualitas produk makanan yang beredar di pasaran. Dalam kondisi yang demikian kesadaran masyarakat untuk memilih produk yang berkualitas semakin meningkat agar daya tahan tubuh tetap terjaga dengan baik. Hal ini sangat mempengaruhi produk yang beredar, sehingga produk makanan yang beredar adalah produk yang memenuhi syarat.

d. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi dengan peningkatan kompetensi dan metode uji ditingkatkan melalui kerjasama dengan pihak eksternal. Pada tahun 2022 mulai digunakan metode uji identifikasi Fe elektrolitik (FeO) sebagai skrining awal untuk mendeteksi Fe elektrolit yang tidak boleh terkandung dalam pangan fortifikasi tepung terigu.

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi garam juga ditingkatkan dengan mulai menggunakan metode uji potensiometri yang lebih akurat dibandingkan metode titrimetric secara manual.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Peningkatan pengawasan pangan fortifikasi terus dilakukan, antara lain melalui peningkatan kemampuan uji. Sebagai contoh untuk tahun 2022 ini telah mulai dilakukan uji skrining awal Fe elektrolitik dan penggunaan potensiometri untuk penetapan kadar NaCl dalam garam. Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil penguji dalam kinerjanya juga tetap dilakukan dengan mengikutsertakan penguji dalam berbagai bimbingan teknis dan magang. Peningkatan ruang lingkup pengujian terus menerus ditingkatkan melalui verifikasi metode analisis, Uji profisiensi, Uji Kolaborasi antar laboratorium dan Uji Banding antar personel dan Laboratorium

Sasaran Strategis-2: Meningkatnya kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2

6. Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja BBPOM di Jakarta.

- a. Matriks Perbandingan target triwulan II dengan dengan tahun 2022**

Tabel 14. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	-	87	-	-	-

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.

Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality (ServQual)* yaitu *Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:

- 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
- 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
- 3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.

Pengukuran indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dilakukan oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) dengan menggunakan survei yang bersifat komposit skala Nasional dan Provinsi dengan metode dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing (CAPI)* berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling*. Hasil survei ini digunakan sebagai rekomendasi untuk peningkatan kinerja BPOM dalam melakukan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dan Pengawasan produk Obat dan Makanan. Pengukuran indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) dari setiap variabel kepuasan dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan dan bobot komoditi. Pengukuran kepuasan masyarakat dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2022, sehingga pada triwulan II belum dapat ditetapkan.

Sasaran Strategis-3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3

7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022*

Tabel 15. Realisasi Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	87,7	-	-	-

Kepuasan pelaku usaha adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik.

Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan pelaku usaha adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Indeks Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang diukur tahunan, sehingga realisasi dan capaian triwulan II belum dapat dihitung.

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022*

Tabel 16. Realisasi Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	-	76,65	-	-	-

- Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan dampak/manfaatnya oleh masyarakat.
- Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun.
- Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep Service Quality (ServQual) yaitu Reliability, Assurance, Empathy, dan Responsiveness yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
 1. Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa.
 2. Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan
 3. Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran.
- Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kedaluwarsa, produk palsu dan illegal yang beredar di masyarakat.

Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator yang diukur tahunan, sehingga realisasi dan capaian triwulan II belum dapat dihitung.

9. Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target triwulan II dengan tahun 2022*

Tabel 17. Realisasi Indeks kepuasan terhadap Layanan Publik BPOM di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BBPOM di Jakarta	-	91	-	-	-

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan

pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Target dinyatakan dalam angka.

Indeks kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh melalui survei dengan metode *multi stage cluster random sampling* dengan *margin of error* 10% terhadap responden yaitu Kepala/Anggota Rumah Tangga dengan rentang usia 17 – 65 tahun.

Indeks ini diukur pada akhir tahun 2022, sehingga pada triwulan II belum ada realisasi dan capaian.

Sasaran Strategis-4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta
Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4

10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Tabel 18. Realisasi Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan TW II tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	91,49	101,66	101,66	BAIK

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi.

Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

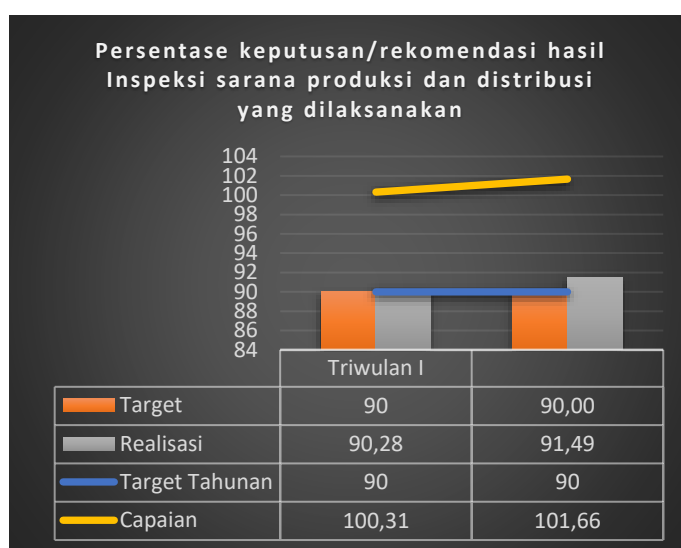
Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain, Pelaku usaha dan Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di Provinsi DKI Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi yang dilaksanakan = $(A+B+C+D)/4$

Cara Perhitungan = $(\text{Jumlah rekomendasi dari lintas sector terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UOT} / \text{jumlah rekomendasi yang diterima dari lintas sektor terkait}) \times 100\%$

b. Perbandingan Capaian Target dan Realisasi TW II Tahun 2022



Gambar 10. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan di TW II mengalami kenaikan capaian dibandingkan dengan TW I yaitu dengan capaian 100,30% dibandingkan dengan TW II adalah sebesar 101,66% capaian kriteria “Baik”.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Jumlah dan ketepatan waktu pengiriman surat tindak lanjut oleh BBPOM di Jakarta terhadap pelaku usaha yang melanggar / tidak sesuai ketentuan, sudah sesuai timeline yang ditetapkan.
- Jumlah tindak lanjut dari BBPOM di Jakarta terhadap rekomendasi dari Pusat, sesama UPT, maupun pemangku kepentingan sudah sesuai.

- Kecepatan respon dari Pusat terhadap rekomendasi dari BBPOM di Jakarta sudah meningkat karena BBPOM di Jakarta aktif melakukan koordinasi lebih intensif dengan unit pusat tentang tindak lanjut dari rekomendasi Balai maupun Laporan dari Balai

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Balai Besar POM di Jakarta mempunyai Sistem si DOEL (Sistem (Spreadsheet) Data Online Pemantauan Sarana dan Tindak Lanjut). Pada system ini berupa form monitoring hasil pengawasan rutin, sehingga dapat dilakukan kontrol terhadap tindak lanjut yang telah/belum dilaksanakan oleh BBPOM di Jakarta
- Adanya kontrol surat masuk dari Pusat, UPT lain, maupun lintas sektor sehingga dapat dikendalikan pelaksanaannya.
- Diperlukannya monitoring khusus untuk rekapitulasi respon dari pusat.

11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Tabel 19. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	77,42	98	98	BAIK

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada stakeholder yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan.

Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan.

Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

- 1) pelaku usaha;

2) lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan)

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah feedback/respon dari stakeholder terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT.

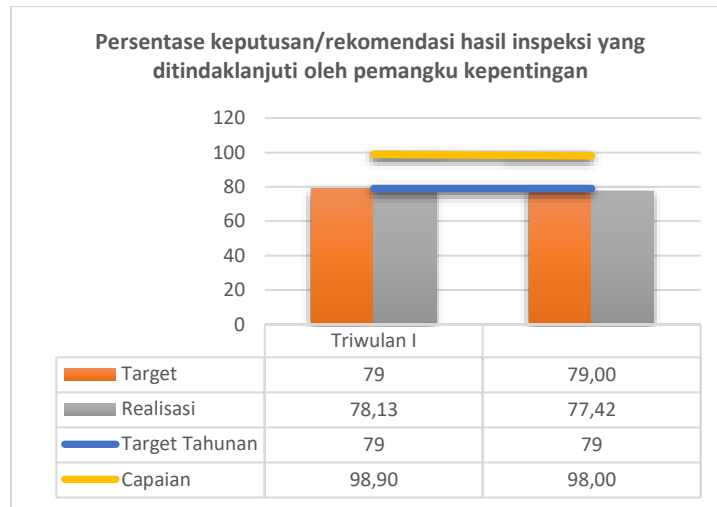
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan = $(A+B)/2$

$$A = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pelaku usaha}} \times 100\%$$

$$B = \frac{\text{Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor}}{\text{Jumlah rekomendasi yang diberikan kepada lintas sektor}} \times 100\%$$

b. Perbandingan realisasi dan capaian tw II tahun 2022



Gambar 11. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Persentase capaian TW II tahun 2022 sebesar 98 % (realisasi 77.42 % dari target 79 %) dengan kriteria “Baik”. Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa realisasi capaian persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang diltindaklanjuti oleh pemangku kepentingan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta pada TW II relative sama dibandingkan dengan TW I yakni dengan kriteria “BAIK” (tetapi belum ada kenaikan berarti dari TW I). Hal ini disebabkan respon dari pemangku kepentingan terhadap surat rekomendasi dari BBPOM di Jakarta relative sama dibandingkan periode triwulan sebelumnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

- Rekomendasi Semakin Semakin sedikit jumlah respon dari pelaku usaha terhadap surat tindak lanjut yang dikirim BBPOM di Jakarta maka akan semakin rendah capaian indikator kinerjanya.
- Semakin sedikit tindak lanjut yang dilaksanakan oleh lintas sektor maka akan semakin rendah juga capaian indikator kinerjanya. Tindak lanjut lintas sektor terkait pembinaan sarana hanya untuk PIRT oleh Suku Dinas Kesehatan terkait menggunakan aplikasi SMART-POM sebagai salah satu wadah komunikasi dengan BBPOM di Jakarta, tetapi aplikasi ini harus diapprove BPOM Pusat sehingga menyebabkan belum adanya pembinaan yang dilakukan Suku Dinas Kesehatan terhadap sarana PIRT yang melanggar.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Kurang dioptimalkannya penggunaan Form CAPA yang diisi saat pemeriksaan misalnya sarana IFP/IFK dan sarana distribusi lain di wilayah DKI Jakarta.
- Mengirimkan surat rekomendasi (hardcopy) kepada Suku Dinas Kesehatan terkait untuk segera melakukan pembinaan sarana.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja).

Pencapaian triwulan pertama ini merupakan upaya penerapan rekomendasi perbaikan kinerja di TW I tahun 2022 tetapi hasil ini bisa belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja dan menunggu data Triwulan berikutnya.

12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Tabel 20. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

TW II tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87	94,70	108,85	108,85	BAIK

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:

- (1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT
- (2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk
- (3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik
- (4) Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan olahan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar
- (5) Surat rekomendasi bagi sarana importir kosmetik dan usaha perorangan/badan usaha yang melakukan kontrak produksi kosmetik
- (6) Surat Rekomendasi obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT SK
- (7) Penerbitan persetujuan denah bangunan PBF

Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati timeline yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian.

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

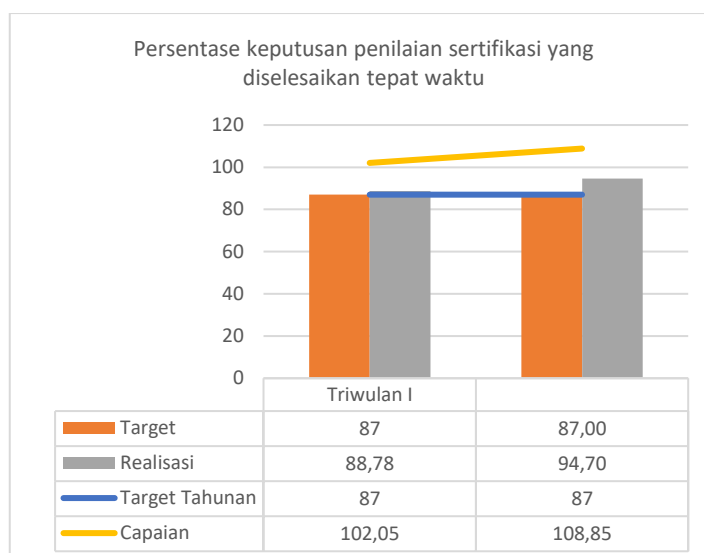
$$\text{Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu} = \frac{\text{Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah permohonan penilaian sertifikasi}} \times 100\%$$

Penilaian sertifikasi mencakup yang diselesaikan pada tahun berjalan dan carry over tahun sebelumnya.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target TW II tahun 2022

Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di TW II mengalami kenaikan capaian dibandingkan dengan TW I yaitu dengan capaian sebesar 108.85% dibandingkan dengan TW II adalah sebesar 102,05% capaian kriteria “**Baik**”.

Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi peningkatan capaian sebanyak 6,8 poin.



Gambar 12. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu merupakan jaminan kepastian pelayanan yang diberikan oleh Balai Besar POM di Jakarta kepada pelaku usaha. Dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi yang meliputi surat rekomendasi dan surat hasil pemeriksaan produksi/distribusi dan surat permintaan perbaikan dalam rangka pendaftaran produk Obat dan Makanan, Balai Besar POM di Jakarta telah menetapkan batas waktu dari mulai diterimanya berkas permohonan hingga penerbitan surat rekomendasi/ surat hasil pemeriksaan dan surat permintaan perbaikan tersebut.

Pemenuhan batas waktu dalam memberikan keputusan penilaian sertifikasi dapat terhambat dengan keterbatasan sumber daya manusia jika dibandingkan dengan banyaknya permohonan yang masuk. Tetapi hal ini dapat diatasi dengan subsidi tenaga dari subkelompok substansi inspeksi. Namun dengan peningkatan jumlah SDM, kemampuan dan kompetensi serta inovasi yang ada pada tata laksana kegiatan sertifikasi yang tersedia, pencapaian realisasi persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 dapat melebihi target yang telah ditetapkan

Adanya perubahan sistem pengajuan permohonan yang saat ini melalui Sistem OSS (Online Single Submission) yang diberlakukan sejak akhir tahun 2021 yang lalu merupakan tantangan tersendiri baik bagi pelaku usaha maupun bagi Balai Besar POM di Jakarta untuk memberikan pelayanan. Dengan berlakunya system yang baru ini masih banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dan bingung bagaimana mengatasinya. Begitu juga dengan petugas

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Tah Beberapa kegiatan di tahun 2021 yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu antara lain

- a. Balai Besar POM di Jakarta telah menyelenggarakan Bimbingan Teknis bagi petugas Balai Besar POM di Jakarta dengan narasumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persamaan persepsi diantara petugas Balai Besar POM di Jakarta
- b. Fasilitas UMKM Pangan, Obat Tradisional dan Kosmetika dapat meningkatkan pemenuhan keputusan sertifikasi tepat waktu. Dengan adanya fasilitas UMKM membuat proses sertifikasi pada UMKM lebih cepat.
- c. Percepatan pelayanan prima terus dilaksanakan di Balai Besar POM di Jakarta guna mempercepat perizinan berusaha di Indonesia dalam hal ini percepatan pemberian izin edar produk, percepatan penerapan cara produksi yang baik. Balai Besar POM di Jakarta sebagai salah satu institusi penyelenggara pelayanan publik, berkewajiban memberikan pelayanan publik yang berorientasi kepada masyarakat pengguna layanan oleh karenanya Balai Besar POM di Jakarta melaksanakan (Desk CAPA) bagi para pelaku usaha. Perusahaan yang kesulitan memenuhi kekurangan saat audit diundang untuk melakukan diskusi terkait perbaikan dengan masing-masing auditor sehingga pemenuhan kekurangan pada saat audit lebih cepat dan lebih efektif dan efisien. Desk CAPA sampai dengan triwulan II tahun 2022 diselenggarakan pada 28 Maret 2022 sampai dengan 16 Juni 2022 yang dilakukan secara daring. Diskusi ini diprioritaskan pada sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian perbaikan.
- d. Selain Desk CAPA dalam rangka pelayanan prima BBPOM di Jakarta juga menyelenggarakan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen Izin Penerapan CPPOB. Dengan diadakan pelayanan ini diharapkan pelaku usaha dapat lebih paham terkait dokumen yang diperlukan untuk pemenuhan persyaratan dalam rangka penerbitan Surat Izin Penerapan CPPOB. Pada triwulan II diskusi tersebut telah dilaksanakan sebanyak empat kali yaitu pada tanggal 10 Januari 2022, 25 Februari 2022, 28 Maret 2022 dan 16 Juni 2022
- e. Kerling Di samping itu pelayanan prima dalam bentuk Desk CAPA dan diskusi dalam rangka pemenuhan dokumen izin penerapan CPPOB BBPOM di Jakarta dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan melaksanakan desk registrasi bagi pelaku usaha UMKM pangan yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun yang telah memiliki izin penerapan CPPOB. Sampai dengan triwulan dua 2022 kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebanyak tiga kali yaitu pada tanggal 16 Maret 2022, tanggal 24 Mei 2022 sampai dengan tanggal 25 Mei 2022 dan tanggal 20 Juni 2022 sampai dengan 21 Juni 2022 baik secara luring maupun daring. Setelah kegiatan telah diterbitkan sebanyak 111 (setarus sebelas) Nomor Izin edar(NIE) pangan olahan

- f. Kegiatan Sertifikasi dan Layanan Informasi Keliling BBPOM di Jakarta (Kerling Jakarta) yang membantu percepatan layanan sertifikasi dan membantu juga untuk meningkatkan persentase proses yang tepat waktu
- g. Sultan Betawi yaitu loket Balai Besar POM di Jakarta pada Mall Pelayanan Publik. Dengan hadirnya BBPOM di Jakarta di Mall Pelayanan Publik, pelaku usaha yang akan berkonsultasi tidak harus ke Balai Besar POM di Jakarta
- h. Balai Besar POM di Jakarta telah menyusun sistem monitoring melalui spread sheet untuk memantau permohonan yang masuk sampai dengan diterbitkannya rekomendasi oleh Balai Besar POM di Jakarta sehingga kinerja disetiap tahapan dapat terukur.

Kendala yang masih dialami Balai Besar POM di Jakarta yaitu:

- Sebagian sarana pemahaman terhadap persyaratan masih rendah dan diiringi dengan komitmen untuk memahami kalau penerapan Cara Produksi yang baik rendah karena menganggap semua hal yang harus dilengkapi hanya sekedar persyaratan bukan untuk pemenuhan mutu dan keamanan produk yang dihasilkan
 - Masih ada sarana yang menyelesaikan pemenuhan terhadap CAPA audit sertifikasi memerlukan waktu yang lama dan berulang kali karena keterbatasan kompetensi dan awareness dari pelaku usaha
 - Data perusahaan pada OSS terutama nomor telepon sering tidak dapat dihubungi sehingga menyulitkan komunikasi dalam rangka konfirmasi jadwal audit
- e. *Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan upaya perbaikan***
- Dengan telah dilakukannya Bimbingan Teknis bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk persamaan persepsi diantara petugas Balai Besar POM di Jakarta maka kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan lebih cepat sehingga pelayanan yang diberikan kepada pelaku usaha menjadi lebih cepat.
 - Akan terus dilakukan program desk CAPA maupun diskusi perbaikan dokumen persyaratab CPPOB yang dilakukan secara terprogram, maupun yang dilakukan secara individu oleh masing-masing auditor. Mengingat keterbatasan sumberdaya desk CAPA akan diselenggarakan secara daring. Adapun sasaran desk CAPA adalah sarana yang dinilai mengalami kesulitan dalam penyelesaian CAPA
 - Untuk mempercepat proses registrasi pangan olahan bagi UMKM yang telah memiliki rekomendasi dalam rangka pendaftaran pangan olahan maupun izin penerapan CPPOB maka diskusi terkait proses registrasi pangan olahan akan terus dilakukan dengan bekerja sama dengan Direktorat Registrasi Pangan Olahan
 - Untuk meningkatkan kompetensi dan penyamaan persepsi secara rutin akan dilakukan sharing knowledge antara petugas di Kelompok subtransi Pemeriksaan dan Kelompok subtransi Infokom

13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta.

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022*

Tabel 21. Realisasi Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	79,86	126,76	126,76	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Sarana Produksi Obat

Sarana produksi Obat adalah sarana produksi obat, bahan baku obat, produk biologi dan sarana khusus (misalnya: unit transfusi darah, fasilitas radiofarmaka, laboratorium sel punca dan instalasi farmasi rumah sakit). Memenuhi Ketentuan adalah apabila tidak ada temuan kritikal pada saat dilakukan pemeriksaan dan tindaklanjutnya berupa Perbaikan.

Sarana Produksi OT

Sarana produksi Obat Tradisional mencakup IOT, UKOT dan UMOT. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

Untuk sarana IOT: tidak ada temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Untuk sarana UKOT dan UMOT: tidak ada temuan kritis atau sanitasi higien major.

Catatan: Pemeriksaan sarana UKOT dan UMOT akan menggunakan form yang berbeda dengan sarana produksi IOT

Sarana Produksi Kosmetik

Sarana produksi kosmetik mencakup Industri Kosmetik golongan A dan B.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

Sarana produksi Suplemen Kesehatan

Sarana produksi Suplemen Kesehatan mencakup IOT, UKOT (GMP), Industri Farmasi (Fasber) dan Industri Pangan.

Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila tidak ditemukan temuan kritis atau lebih dari 5 temuan major.

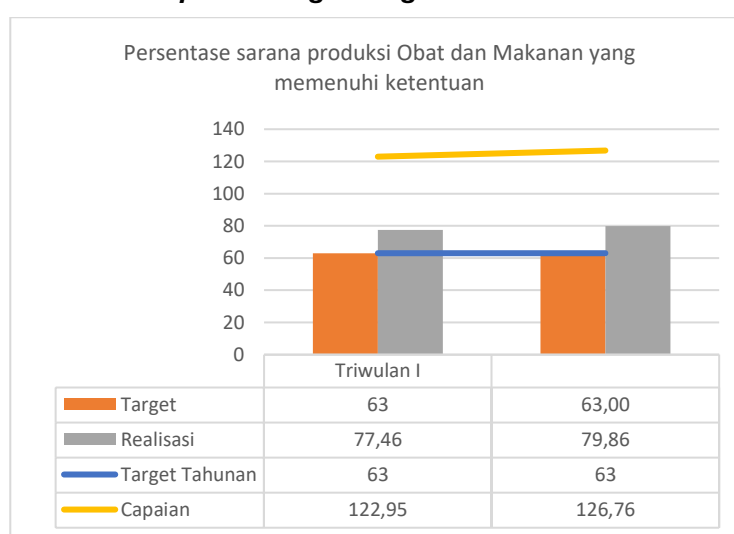
Sarana Produksi Pangan

Sarana produksi pangan mencakup sarana produksi MD dan IRTP/UMKM. Sarana dinyatakan Memenuhi Ketentuan apabila:

- Sarana produksi pangan MD yang memperoleh rating A dan B.
- Sarana produksi IRTP/UMKM memperoleh level 1 dan 2.

Catatan: Pemeriksaan sarana IRTP/UMKM menggunakan form pemeriksaan yang berbeda dengan sarana produksi (industri) pangan.

b. *Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tw II tahun 2022*



Gambar 13. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta melebihi target yang ditetapkan yaitu 126.76 % dengan kriteria “Tidak Dapat Disimpulkan”. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwa sebanyak 79.86 % sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah berhasil memenuhi persyaratan produksi yang ditetapkan Badan POM yaitu sebesar 63 %.

Hal ini disebabkan karena tidak ditemukan beberapa temuan yang kategori kritis dan mayor lebih dari 5 di sarana produksi, karena tingkat kepatuhan pelaku usaha produksi terhadap ketentuan yang berlaku sudah meningkat.

Berdasarkan grafik tersebut diketahui persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW II (kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”) meningkat dibandingkan dengan TW I (kriteria “TIDAK DAPAT DISIMPULKAN”). Hal ini disebabkan banyaknya sarana produksi yang “memenuhi ketentuan” yang diperiksa di TW II tahun 2022 ini.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sebesar 79, % **sudah melebihi target** yang ditentukan (63 %). Keberhasilan pencapaian target indikator persentase sarana produksi yang memenuhi ketentuan disebabkan oleh beberapa hal yaitu:

1. Dari uraian capaian pada tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian memenuhi ketentuan yang rendah banyak pada UMKM yaitu Industri Rumah Tangga Pangan dan juga di Industri Pangan, karena tahun 2022 ini mayoritas industry pangan yang diperiksa adalah dari kategori pangan UMKM yang mendapat program fasilitasi MD.
2. Rendahnya kemampuan UMKM untuk memenuhi cara produksi yang baik dan menerapkan cara produksi yang baik pada sarana produksinya dan kendala perekonomian.

Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dalam mengatasi masih rendahnya sarana yang memenuhi ketentuan adalah:

1. Melakukan koordinasi dengan lintas sektor terkait pembinaan Industri Rumah Tangga Pangan dan UMKM Pangan sehingga konsisten dalam penerapan cara produksi yang baik.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Belum adanya form pemeriksaan khusus untuk UMKM dan form pemeriksaan sarana produksi pangan sama untuk semua jenis kategori pangan sehingga menyulitkan pemenuhan untuk sarana UMKM.
- ✓ Kemampuan Sumber daya dalam jumlah dan kualitas pembinaan oleh Lintas Sektor terkait masih terbatas dan bervariasi dari setiap wilayah di Propinsi DKI Jakarta.

Rencana kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan tahun selanjutnya:

1. Pelatihan aspek GMP misal pelatihan Food Inspektur dll untuk petugas Balai untuk meningkatkan kompetensi dan keseragaman petugas

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan pengawasan sarana produksi obat dan makanan yang dilaksanakan adalah pemeriksaan sarana industri farmasi, industri kecil obat tradisional (IKOT), industri obat tradisional (IOT), industri kosmetik, industri pangan, dan industri rumah tangga pangan (IRTP). Beberapa kegiatan lain yang diupayakan untuk meminimalisasi kegagalan pencapaian kinerja antara lain :

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, antara lain pelatihan inspektur GMP. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana produksi juga lebih berkualitas.
- Pembinaan kepada pelaku usaha (*regulatory assistance*), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana produksi obat dan makanan yang melakukan pelanggaran.
- *Desk CAPA (corrective action preventive action)* atas hasil pemeriksaan akan membantu pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi pesentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta. Di triwulan II tahun 2022, capaian lebih dari target yang ditetapkan, tetapi kriteria Tidak Dapat Disimpulkan. Sehingga dengan hasil ini bisa belum memberikan gambaran nyata keberhasilan indikator kinerja dan menunggu data Triwulan berikutnya.

14. Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II tahun 2022*

Tabel 22. Realisasi Persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	83,07	110,76	110,76	SANGAT BAIK

Persentase sarana distribusi Obat yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta diperoleh dengan rumus sebagai berikut :

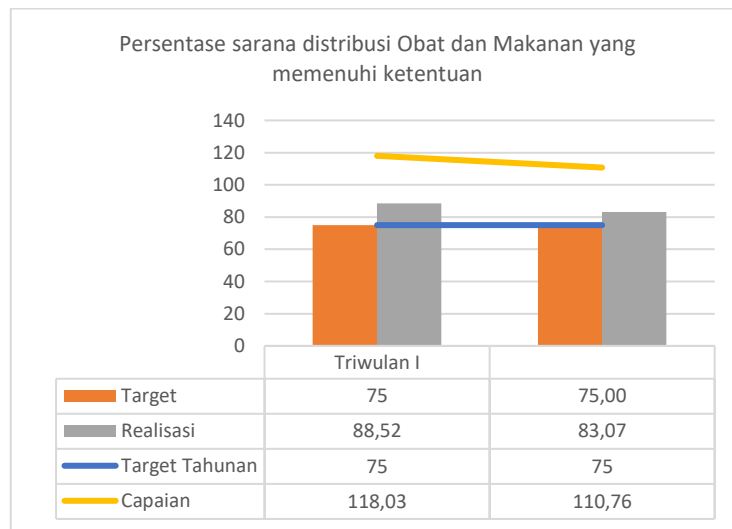
$$\% \text{ Sarana Distribusi MK} = \frac{\text{Jumlah Sarana distribusi OM yang memenuhi ketentuan}}{\text{Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa}} \times 100\%$$

Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin).

Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian resiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:

- (1) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat
- (2) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi OT, Kos dan SK
- (3) Pedoman pemeriksaan sarana produksi dan distribusi pangan
- (4) Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengawasan Fasilitas Distribusi Obat/Bahan Obat dan Fasilitas Pelayanan Kefarmasian

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target 2022



Gambar 14. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Capaian persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta sudah melebihi target yang ditetapkan yaitu 110.76 % dengan kriteria “SANGAT BAIK”. Sehingga dapat dinyatakan bahwa sebanyak 83.07 % sarana distribusi obat di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi persyaratan yang ditetapkan Badan POM yaitu target 75 %.

Berdasarkan grafik tersebut diketahui bahwa Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta TW I maupun TW II tahun 2022 telah melebihi target yang ditetapkan, serta dapat diketahui bahwa persentase pada TW II menurun dibandingkan dengan TW I (tetapi sama-sama berkriteria "Sangat Baik"). Hal ini dipengaruhi oleh makin meningkatnya kepatuhan pelaku usaha sarana distribusi obat dan makanan dalam mematuhi regulasi yang ada, tetapi belum dapat sebagai kesimpulan akhir karena masih menunggu hasil triwulan berikutnya.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Balai Besar POM di Jakarta berhasil mencapai target sarana distribusi obat, obat tradisional dan pangan yang memenuhi ketentuan. Beberapa hal yang menunjang keberhasilan pencapaian target persentase distribusi obat yang memenuhi syarat adalah:

- Adalah Mulai diberlakukannya aturan yang mengharuskan PBF mempunyai sertifikat Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), sehingga pihak sarana berupaya untuk memenuhi persyaratan CDOB yang ditetapkan secara maksimal
- Kesadaran pelaku usaha terhadap kepatuhan terhadap peraturan meningkat
- Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran antara lain menjual produk obat yang tidak memenuhi ketentuan.
- Intensifnya pemeriksaan sarana pengelola vaksin Covid-19 (Puskesmas dan RS) sehingga kepatuhan juga meningkat.

Kendala dan permasalahan yang dihadapi Balai Besar POM di Jakarta dalam pemenuhan target *output*:

- ✓ Kurangnya pengetahuan pelaku usaha seperti terkait peraturan yang berlaku

Usulan kegiatan yang akan dilakukan pada tahun 2022 dan tahun-tahun berikutnya:

1. Memaksimalkan penerapan system online yang ada sehingga kendala Sumber Daya dapat diatasi.
2. Evaluasi lebih konsisten setiap bulan dan tindakan perbaikan dan kegiatan pencegahan terhadap pencapaian *output*.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan antara lain.

- Pelatihan peningkatan kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta. Dengan meningkatnya kompetensi petugas Balai Besar POM di Jakarta, maka hasil pemeriksaan sarana distribusi lebih berkualitas.

Pembinaan kepada pelaku usaha (regulatory assistance), penerapan sanksi (proses projustitia maupun administratif) sesuai ketentuan yang berlaku terhadap sarana distribusi obat yang melakukan pelanggaran.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Berdasarkan hasil rekomendasi, maka indikator ini diubah menjadi persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan supaya lebih menggambarkan kinerja Balai Besar POM di Jakarta dan di triwulan II tahun 2022, capaian lebih dari target yang ditetapkan, dengan kriteria Sangat Baik.

Hal ini menunjukkan bahwa Balai Besar POM di Jakarta berhasil meningkatkan persentase pemeriksaan sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan sehingga melebihi target nasional.

15. Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta.

a. Perbandingan target triwulan II dengan tahun 2022

Tabel 23. Realisasi indeks pelayanan publik di lingkup BBPOM di Jakarta tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Indeks Pelayanan Publik di Lingkup BBPOM di Jakarta	-	4,3	-	-	-

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- 1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
- 2) Profesionalitas SDM (18%);
- 3) Sarana Prasarana (15%);
- 4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
- 5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
- 6) Inovasi (7%).

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022

Indeks pelayanan publik di lingkup Balai Besar POM di Jakarta merupakan indikator tahunan sehingga realisasi dan capaian triwulan II belum dapat dihitung dan dibandingkan dengan target tahun 2022. Hasil penilaian UPP BPOM akan dilakukan pada akhir tahun 2022, sehingga pada triwulan II tahun 2022 ini belum ada realisasi dan capaian

16. **Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik**

a. **Perbandingan target triwulan II dengan tahun 2022**

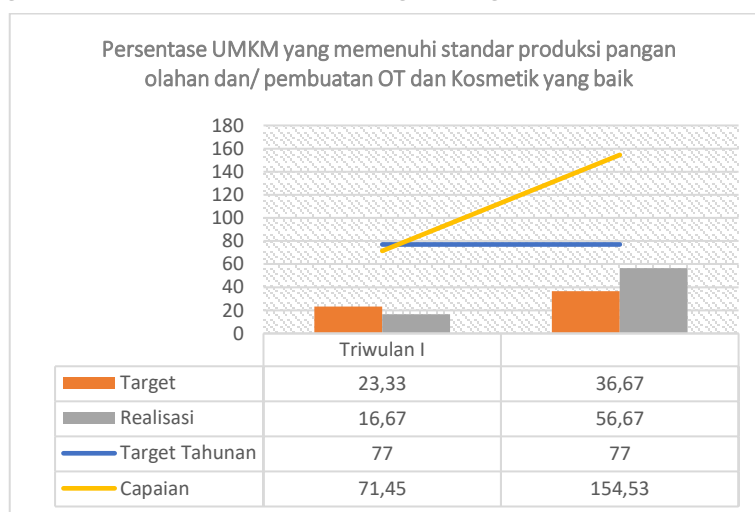
Tabel 24. Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/ pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	36,67	77	56,67	154,53	154,53	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Kriteria UMKM:

Untuk UMKM Pangan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan. Untuk UMKM OT mengacu pada Permenkes 26 Tahun 2018. Untuk UMKM Kosmetik: 1) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi) 2) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

b. **Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022**



Gambar 15. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Persentase Capaian dan Realisasi Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan/pembuatan OT dan Kosmetik yang baik triwulan I tahun 2022 sebesar 100,15 % dan 94,54% diatas target TW I Tahun 2022 yang ditetapkan yaitu 23,33% dengan kriteria “baik”. Jika dibandingkan dengan

TW I, pada triwulan II ini terjadi peningkatan yang sangat signifikan dikarenakan target yang ditetapkan untuk TW II ini terlalu rendah dibandingkan dengan capaian yang dihasilkan dengan capaian sebanyak 83,08 poin.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilaksanakan

- Terjadinya pandemic Covid-19 di awal tahun 2020, di mana pemerintah menetapkan pembatasan kegiatan sehingga membuat kegiatan visitasi UMKM sedikit terhambat
- Pelatihan bagi fasilitator Balai Besar POM di Jakarta yang tidak tepat waktu oleh Pusat sehingga waktu pelaksanaan Bimtek di Balai bagi pelaku usaha mengalami penundaan waktu
- Terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Melakukan percepatan pelaksanaan Bimtek bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada fasilitasi tahun 2022 oleh Balai Besar POM di Jakarta
- Melakukan percepatan visitasi dan penggalangan komitmen bagi pelaku usaha UMKM yang akan didampingi pada tahun 2022
- Balai Besar POM di Jakarta melakukan kolaborasi fasilitasi UMKM Pangan bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta untuk menjangkau lebih banyak peaku usaha UMKM Pangan yang dapat didampingi untuk mendapatkan Nomor Izin Edar Pangan Olahan (NIE MD)
- Adanya kegiatan faslitasi UMKM produksi obat tradisional dan produksi kosmetik yang mulai diadakan tahun 2022 diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM Pangan yang dapat difasilitasi
- Untuk mengatasi terbatasnya jumlah fasilitator UMKM di Balai Besar POM di Jakarta untuk mendampingi pelaku usaha di DKI Jakarta, Balai Besar POM di Jakarta melakukan pembentukan fasilitator yang merupakan pendamping JakPreneur dari Dinas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut ats rekomendasi perbaikan kinerja sebelumnya dan upaya perbaikan

- Balai Besar POM di Jakarta telah menginisiasi audiensi dan Forum Grup Dissussion (FGD) untuk melakukan kolaborasi bersama Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Provinsi DKI Jakarta pada awal tahun 2022 dan terus berkomunikasi dengan lintas sektor untuk memastikan setiap tahapan perencanaan kegiatan dapat berlangsung.
- Balai Besar POM di Jakarta bekerja sama dengan Dinas PPKUM melakukan visitasi daring maupun luring untuk melakukan seleksi terhadap pelaku usaha yang memungkinkan untuk difasilitasi dalam waktu dekat. Visitasi bertujuan untuk melihat kesiapan pelaku usaha dalam mempersiapkan tempat produksi sehingga diharapkan fasilitasi dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran

- Besar POM di Jakarta mengadakan pelatihan fasilitator UMKM yang berasal dari personil Jakpener dalam upaya peningkatan kapasitas dan kemampuan dalam membantu pelaku usaha dalam menerapkan sistem CPPOB sehingga pelaku usaha dapat segera memperoleh izin penerapan CPPOB sebagai persyaratan pembuatan akun perusahaan pada system sertifikasi produk pangan Badan POM

Sasaran Strategis-5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi obat dan makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5

17. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Tabel 25. Realisasi Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan yang efektif di di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	94,4	94,4	94,82	100,44	100,44	BAIK

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:

- 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
- 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
- 3) KIE melalui media sosial

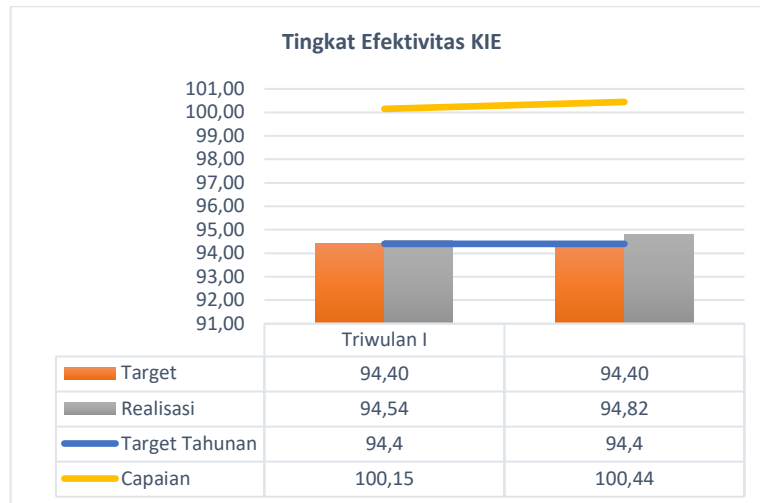
Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
- 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
- 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa face to face interview, penyebaran kuesioner dan online survey. Tingkat efektivitas KIE obat dan makanan diukur melalui survei dengan target responden adalah masyarakat yang pernah menjadi peserta dan/atau terpapar KIE BPOM melalui berbagai media pada tahun berjalan.

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta triwulan II meningkat jika dibandingkan dengan realisasi triwulan I sebesar 94,54. Begitu pula capaian kinerja meningkat dari triwulan I sebesar 100,15% menjadi 100,44% pada triwulan II.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tw II tahun 2022



Gambar 16. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Realisasi tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan BBPOM di Jakarta triwulan II tahun 2022 diperoleh sebesar 94,82. Apabila dibandingkan dengan target 2022 sebesar 94,4, nilai realisasi telah melampaui target dengan capaian sebesar 100,44% dengan kriteria kinerja **“Baik”**. Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi peningkatan capaian sebanyak 0,29 poin.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian kinerja tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan, BBPOM di Jakarta Triwulan II tahun 2022 disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Terselenggaranya Sosialisasi Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama Tokoh Masyarakat Komisi IX DPR RI, Dr. Hj. Kurniasih Mufidayati, M.Si, sebanyak 12 (dua belas) titik di Wilayah DKI Jakarta dengan total peserta sebanyak 3.000 orang dengan metode KIE tatap muka.



Gambar 17. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi pemberdayaan masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan bersama tokoh masyarakat

Terselenggaranya Terselenggaranya rangkaian kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis keamanan pangan bagi kader sekolah, desa/kelurahan, dan pasar melalui program prioritas keamanan pangan PJAS, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Berbasis Komunitas

2. Kegiatan penyebaran informasi melalui intensifikasi pengawasan keamanan pangan pada saat Ramadhan dan menjelang hari raya Idul Fitri.
3. Intensifikasi penggunaan media sosial sebagai media KIE Obat dan Makanan kepada masyarakat dengan berbagai topik terkini mengenai isu Obat dan Makanan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kegiatan

Beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indeks efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Triwulan II tahun 2022 ini antara lain:

1. Metode KIE secara tatap muka yang dinilai efektif dalam menyampaikan informasi Obat dan Makanan secara langsung kepada masyarakat serta meningkatkan pula keterlibatan dan pemahaman masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan KIE Obat dan Makanan Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat
2. Pemberian materi melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis terutama terkait keamanan pangan kepada komunitas masyarakat.
3. Penyebaran konten KIE melalui media sosial dengan berbagai tema dan bentuk seperti infografis, videografis, dan video. Salah satunya adalah implementasi inovasi Aripin (Asupan Rabuan Pintar) yang menyediakan konten mengenai obat dan makanan yang disosialisasikan setiap hari Rabu di media sosial BBPOM di Jakarta (Instagram, Facebook, dan Twitter).
4. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media cetak dan media elektronik, baik koran maupun media berita daring

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Sebagai evaluasi dari pelaksanaan KIE tahun sebelumnya, diperlukan tindak lanjut baik pada pelaksanaan teknis KIE yang ditujukan untuk meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan dengan melakukan analisis terhadap hasil survei kepuasan pelaksanaan KIE sehingga dapat dijadikan rekomendasi perbaikan penyelenggaraan KIE selanjutnya. Selain itu, koordinasi dengan Kelompok Substansi Pengaduan Masyarakat, Biro Hukum dan Organisasi BPOM sebagai pengolah survei tingkat efektivitas KIE terus ditingkatkan sebagai bentuk pemantauan terhadap pelaporan dan input data survei.

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022*

Tabel 26. Realisasi Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	70 (progress)	65	70 (progress)	100	100	BAIK

PJAS adalah kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau e-commerce. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

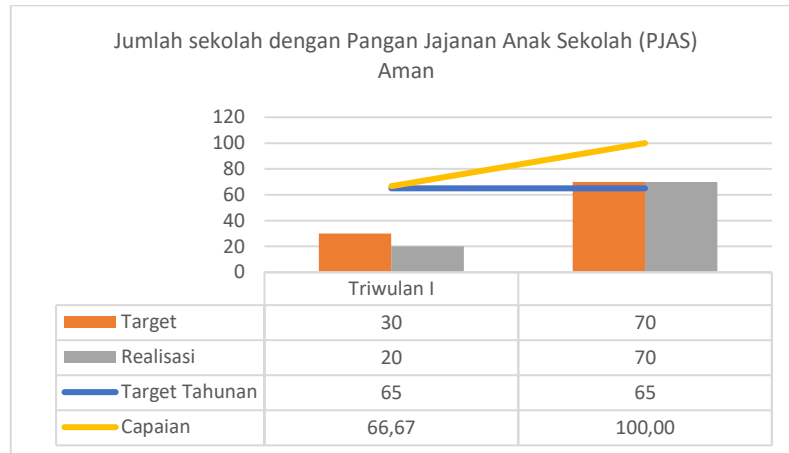
Intervensi keamanan PJAS adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, dan sertifikasi PJAS Aman.

Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:

- 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah,
- 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya, memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman yang membahayakan kesehatan.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022



Gambar 18. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress tahapan intervensi, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah sekolah sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.

Kesehatan Dengan realisasi presentase progress tahapan intervensi PJAS triwulan II sebesar 70% diperoleh capaian kinerja sebesar 100,00%. Nilai ini meningkat signifikan dibandingkan capaian kinerja pada triwulan I sebesar 66,67%, yaitu realisasi presentase progress tahapan intervensi sebesar 20% belum mencapai target sebesar 30%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab tercapainya target kinerja program intervensi PJAS pada Triwulan II tahun 2022 ini ialah peningkatan koordinasi dengan pemerintah daerah kota Administrasi Jakarta Selatan, OPD terkait dalam hal ini Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Selatan serta sekolah-sekolah intervensi PJAS sehingga pelaksanaan tahapan intervensi dapat berjalan sesuai perencanaan..

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program penunjang keberhasilan capaian kinerja program intervensi PJAS pada Triwulan II tahun 2022 meliputi pelaksanaan Advokasi untuk membentuk komitmen dan sinergisme dalam tahapan intervensi PJAS. Selain itu, telah terbentuknya Kader Keamanan Pangan Sekolah serta telah dibentuknya forum komunikasi dengan kader-kader sekolah tersebut memudahkan dalam pelaksanaan tahapan intervensi.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Yaitu sebagai evaluasi dan tindak lanjut atas rekomendasi pelaksanaan tahapan intervensi PJAS periode sebelumnya, diperlukan perencanaan kegiatan yang lebih matang serta peningkatan komunikasi dengan lintas sektor dan sekolah target melalui forum komunikasi via Whatsapp agar kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.

19. Jumlah desa pangan aman

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Tabel 27. Realisasi Jumlah desa pangan aman Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Jumlah desa pangan aman	40 (progress)	21	45 (progress)	112,5	112,5	SANGAT BAIK

Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi stunting, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707, IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi.

Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi.

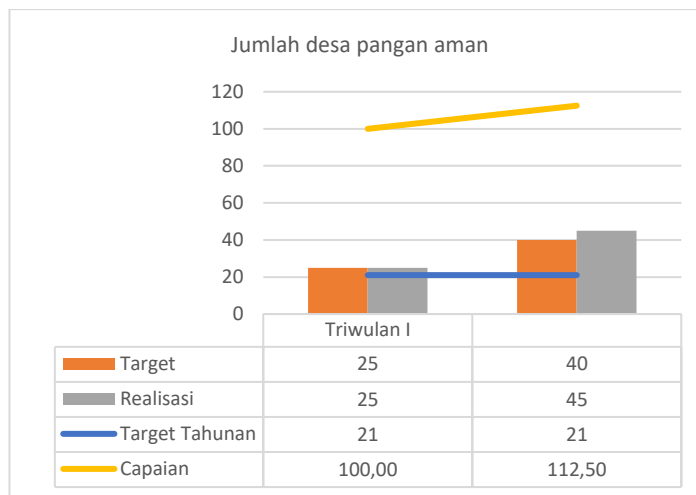
Desa pangan aman ditentukan dari kriteria:

- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif,
- 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa,
- 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Realisasi progress tahapan intervensi Desa Pangan Aman pada Triwulan II tahun 2022 ialah sebesar 45% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi Kelembagaan Desa yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 22 Maret 2022, telah diadakannya paket informasi keamanan pangan, rapid test, dll, Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan pada 30-31 Maret 2022, dan Bimtek Komunitas Desa/Kelurahan

bersama Tokoh Masyarakat pada 30 Juni 2022. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Desa Pangan Aman telah melampaui target Triwulan II yaitu 40% dengan capaian 112,50% kriteria kinerja Sangat Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target TW II tahun 2022



Gambar 19. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah desa pangan aman di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress tahapan intervensi, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah desa sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022.. Capaian kinerja progress tahapan intervensi Desa Pangan Aman triwulan II tahun 2022 ini sebesar 112,50% diperoleh dari realisasi 45% melebihi target presentase tahapan sebesar 40%. Nilai capaian ini meningkat dibandingkan triwulan I sebesar 100,00% dengan nilai realisasi dan target sebesar 25%..

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Penyebab keberhasilan capaian program Desa Pangan Aman pada Triwulan I ini yaitu adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan pada 2 Februari 2022 dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 22 Maret 2022. Dengan adanya sinergisme dan dukungan ini, penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan kinerja adalah berupa optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor kelurahan melalui media Whatsapp sehingga koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan dan Kader Keamanan Pangan Desa/Kelurahan dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Agar target kinerja dapat tercapai dan terjadi peningkatan kinerja diperlukan perencanaan kegiatan yang lebih baik serta didukung oleh komunikasi yang efektif dengan lintas sektor terkait dalam hal ini kelurahan yang diintervensi, OPD terkait keamanan pangan serta kader dan komunitas kelurahan yang dibentuk

20. Jumlah pasar aman pangan berbasis komunitas

a. Perbandingan target, realisasi, dan capaian triwulan II dengan tahun 2022

Tabel 28. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	70 (progress)	3	75 (progress)	107,14	107,14	BAIK

Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan kerangka acuan kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas.

Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dan demand. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survey pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.

Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

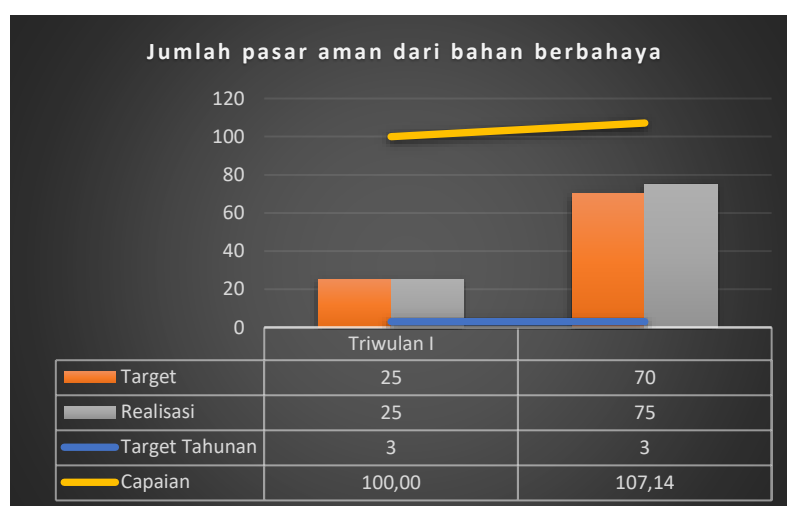
Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi suplai dapat berupa penerapan CRPB oleh pedagang pasar di pasar rakyat. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi demand dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang

belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Jumlah pasar aman dihitung dari jumlah pasar aman yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Mendapat seluruh tahapan intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas.
- Terjadi penurunan %TMK cemaran kimia dan mikrobiologi

Realisasi progress tahapan intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada Triwulan I tahun 2022 ialah sebesar 75% dengan telah terselenggaranya kegiatan Advokasi yang dalam hal ini dilaksanakan secara terpadu dengan program intervensi PJAS aman dan Desa Pangan Aman pada 22 Maret 2022, Survei Pasar pada 9 Maret 2022, Bimtek Pengelola Pasar pada 11 April 2022, Monev Tahap I pada 24-25 Mei 2022, Penyuluhan pada 21 Juni 2022, dan Kampanye pada 27 Juni 2022. Dengan realisasi ini, capaian kinerja intervensi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah melampaui target Triwulan I yaitu 70% dengan capaian 107,14% kriteria kinerja Baik.

b. Perbandingan realisasi dan capaian dengan target tahun 2022



Gambar 20. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Realisasi dan capaian untuk indikator jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta bulanan dan triwulan dihitung dengan presentase progress tahapan intervensi, sedangkan target tahun 2022 memiliki satuan jumlah pasar sehingga nilai realisasi dan capaian triwulan II tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2022. Dengan realisasi progress tahapan pada triwulan II sebesar 75%, diperoleh capaian kinerja sebesar 107,14%. Nilai ini meningkat dibandingkan capaian pada triwulan I sebesar 100,00% dengan realisasi dan target sebesar 25%.

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor keberhasilan tercapainya kinerja tahapan progress intervensi pasar pangan aman berbasis komunitas antara lain adanya kemudahan koordinasi dengan Pengelola Pasar dan Perumda Pasar Jaya

menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya kegiatan sesuai rencana serta adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah (Pemda) dan OPD terkait keamanan pangan sebagai hasil kegiatan Audiensi dengan Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan dan Advokasi Terpadu Pelaksanaan Program Keamanan Pangan Desa Pangan Aman, PJAS aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas pada 22 Maret 2022. Penyelenggaraan intervensi program keamanan pangan terpadu diharapkan dapat berjalan dengan lancar karena telah terbentuk forum komunikasi yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tahapan kegiatan.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan kinerja adalah optimalisasi koordinasi dengan lintas sektor pengelola pasar melalui media Whatsapp sehingga koordinasi dapat terus berjalan dengan efektif dan kontinu. Kegiatan survei pasar yang dilakukan sebelum pelaksanaan program pada 9 Maret 2022 yang bertujuan untuk mengidentifikasi pasar tradisional yang memenuhi persyaratan pasar sehat sebagai prioritas sasaran pengendalian bahan berbahaya dan mengidentifikasi pedagang pasar serta inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya menjadi salah satu kegiatan yang penting dalam pelaksanaan tahapan intervensi selanjutnya. Selain itu, telah dilakukannya bimtek bagi pengelola pasar meningkatkan pemahaman komunitas pasar tentang program intervensi dan praktik keamanan pangan.

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya

Agar target kinerja dapat tercapai dan meningkat dari tahun sebelumnya diperlukan perencanaan dan pelaksanaan tahapan kegiatan yang baik diikuti dengan komunikasi yang efektif dengan pengelola pasar target, contohnya komunikasi efektif melalui forum komunikasi via Whatsapp dan pertemuan diskusi baik secara tatap muka maupun secara daring via Zoom.

Sasaran Strategis-6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 6

21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022*

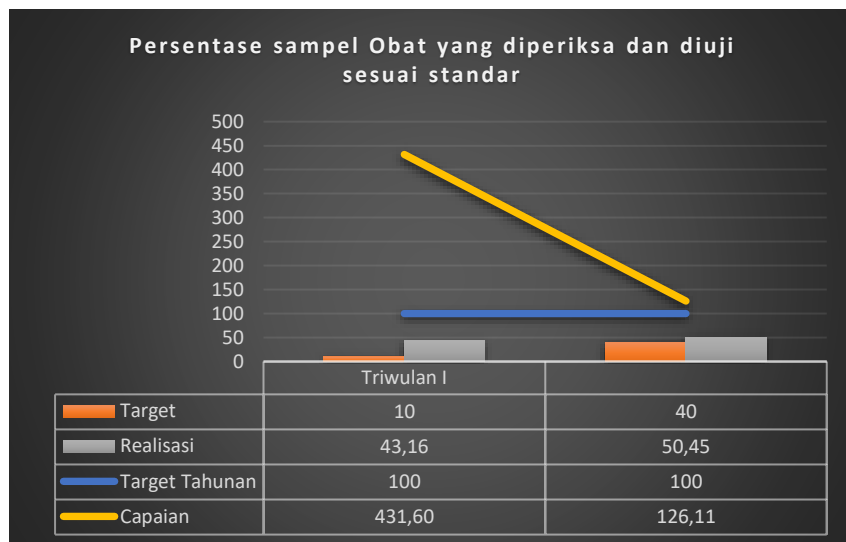
Tabel 29. Realisasi persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	100	50,45	126,11	126,11	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan catchment area. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II tahun 2022

Capaian persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar di Provinsi DKI Jakarta melebihi target yang ditetapkan yaitu 126,11% dengan kriteria “Tidak dapat disimpulkan”. Dengan demikian, dapat dinyatakan bahwa pelaksanaan pengujian laboratorium Balai Besar POM di Jakarta telah berhasil memenuhi standar yang ditetapkan Badan POM. Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi penurunan capaian sebanyak 305,49 poin. Tingginya selisih pada capaian TW I dan TW II ini disebabkan karena terlalu rendahnya target yang ditetapkan pada TW I yaitu target sebesar 10 dengan realisasi 43,16.



Gambar 21. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingginya capaian indikator kinerja Triwulan II tahun 2022 tersebut disebabkan oleh adanya penambahan jumlah sampel mulai tahun 2022 terkait dengan penerapan Regionalisasi Laboratorium. Penambahan jumlah sampel dalam rangka regionalisasi laboratorium ini belum diperhitungkan secara pasti dalam penetapan target bulanan tahun 2022 (penetapan target dilakukan sebelum target sampel regionalisasi

ditetapkan). Sampel regional diterima dari BBPOM Bandung, BBPOM Serang, BBPOM Yogyakarta, BBPOM Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai tersebut. Sampel yang diterima saat ini sudah mencapai 1236 sampel dan sudah selesai uji sebanyak 1029 sampel (83.25%).

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.
- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis dari laboratorium kosmetik, 12 metode analisis dari laboratorium obat tradisional dan Suplemen Kesehatan dan 12 metode analisis dari laboratorium obat
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015, yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Pemanfaatan Alat laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal.
- Pemenuhan peralatan dan kebutuhan pengujian untuk menjamin kelancaran pelaksanaan pengujian

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten dan berkelanjutan. Kendala operasional laboratorium untuk program pemeliharaan alat laboratorium tahun 2021 sudah bisa diatasi karena sudah dilaksanakannya program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor). sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya. Program ini diharapkan dapat terlaksana untuk tahun tahun yang akan datang.

22. Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

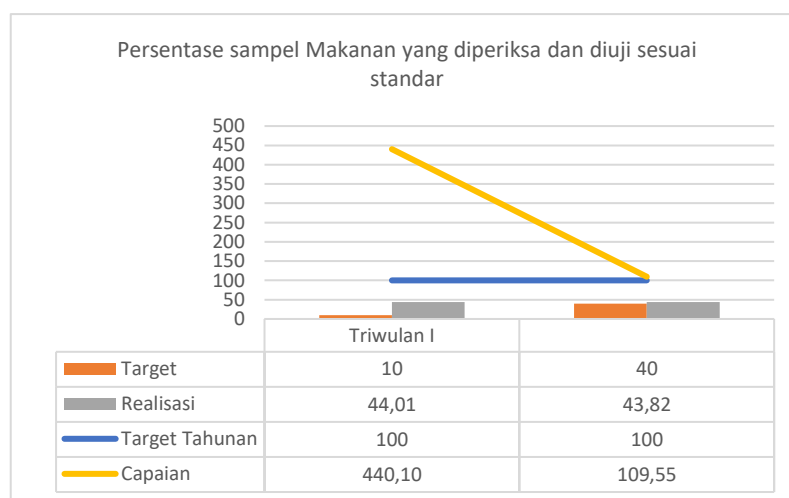
a. Perbandingan target dan realisasi tw II tahun 2022

Tabel 30. Realisasi Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar Tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	40	100	43,82	109,55	109,55	BAIK

Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan catchment area. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sample dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga timeline yang ditetapkan dalam pedoman/SOP

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II tahun 2022



Gambar 22. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

Realisasi persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2022 sebesar 43.82%, sedangkan capaian persentase makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar pada Triwulan II Tahun 2022 dibandingkan dengan target Triwulan II tahun 2022 adalah sebesar 109.55%. Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi peningkatan capaian sebanyak 330,55 poin. Tingginya selisih pada

capaian TW I dan TW II ini disebabkan karena terlalu rendahnya target yang ditetapkan pada TW I yaitu target sebesar 10 dengan realisasi 44,01.

c. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan ataupun peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Tingginya capaian indikator kinerja Triwulan II tahun 2022 tersebut disebabkan adanya penambahan jumlah sampel mulai tahun 2022 terkait dengan penerapan Regionalisasi. Sampel regional diterima dari BBPOM di Bandung, BBPOM Serang, BBPOM di Yogyakarta dan BBPOM di Semarang serta Loka POM yang dikoordinasikan oleh Balai-balai tersebut.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

- Meningkatnya jumlah produk pangan yang beredar di masyarakat dan beragamnya kondimen dan BTP yang digunakan oleh produsen untuk memproduksi produk pangan menjadi perhatian BBPOM di Jakarta khususnya Laboratorium Pangan untuk lebih meningkatkan kemampuan ujinya.
- Peningkatan Ruang Lingkup Pengujian terus menerus dilakukan guna menjamin tersedianya metoda yang valid dalam pengujian dengan meningkatkan metode uji dan melakukan verifikasi Metoda Analisis, mengikuti Uji profisiensi baik secara internal maupun eksternal, juga mengikuti Uji Kolaborasi antar laboratorium. Peningkatan metode uji tersebut juga meliputi penambahan jenis metode untuk satu parameter uji sehingga diharapkan dapat membantu dan memberikan solusi terhadap kendala kerusakan alat yang dipakai secara rutin agar kecepatan pengujian tidak terhambat.
- Banyaknya sampel kasus yang menjadi isu eksternal dan internal akhir-akhir ini, termasuk juga pengujian kemasan pangan polikarbonat dalam rangka penyusunan regulasi, juga mempengaruhi jadwal uji dan pemenuhan timeline pengujian sampel pengawasan rutin.
- Peningkatan kompetensi laboratorium dan personil pengujian juga dilakukan dengan mengikutsertakan personil pengujian dalam berbagai bimbingan teknis dan magang.
- Pemanfaatan dan pemenuhan peralatan laboratorium dan Sarana Prasarana laboratorium secara maksimal guna menjamin kelancaran dan pelaksanaan pengujian

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Program Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta untuk meningkatkan capaian kinerja adalah:

- menyelenggarakan pelatihan internal, mengikutsertakan personil pengujian dalam pelatihan eksternal dan kegiatan magang untuk meningkatkan pengetahuan dan kompetensi personil pengujian.

- melakukan Verifikasi Metode Analisis yang bertujuan untuk membuktikan bahwa metode analisa yang digunakan menghasilkan uji yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sebanyak 12 metode analisis
- Program Kalibrasi Alat laboratorium yang dilakukan secara berkala setiap tahun yang bertujuan untuk menjamin peralatan memberikan hasil pengukuran sesuai dengan standar Nasional maupun Internasional dan untuk menjaga kondisi peralatan yang digunakan tetap sesuai dengan spesifikasinya.
- Penerapan Sistem Mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 dan akreditasinya yang merupakan pengakuan pihak ketiga terhadap kompetensi laboratorium dalam melakukan kegiatan pengujian.
- Tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya telah dilakukan dengan meningkatkan penerapan sistem manajemen mutu ISO 17025:2017 dan ISO 9001:2015 secara konsisten.
- Kendala operasional laboratorium untuk program pemeliharaan alat laboratorium tahun 2022 sudah bisa diatasi karena sudah dilaksanakannya program pemeliharaan alat bekerjasama dengan pihak ketiga (vendor) sehingga ada jaminan alat dapat bekerja sesuai fungsinya. Program ini diharapkan tetap dapat terlaksana untuk tahun tahun yang akan datang.

Sasaran Strategis-7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 7

23. Tingkat Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Tabel 31. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	30	58	31,67	105,56	105,57	BAIK

Penilaian keberhasilan penindakan dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap setiap tahap dalam proses penyelesaian berkas perkara, yaitu dengan pembagian bobot berturut-turut sebagai berikut:

- a) SPDP sebesar 15% -- nilai A [(a+b+c+d) / jumlah perkara]

- b) Tahap 1 sebesar 40% -- nilai B [(b+c+d) / jumlah perkara]
- c) P21 sebesar 30% -- nilai C [(c+d) / jumlah perkara]
- d) Tahap 2 sebesar 15% -- nilai D [d / jumlah perkara]

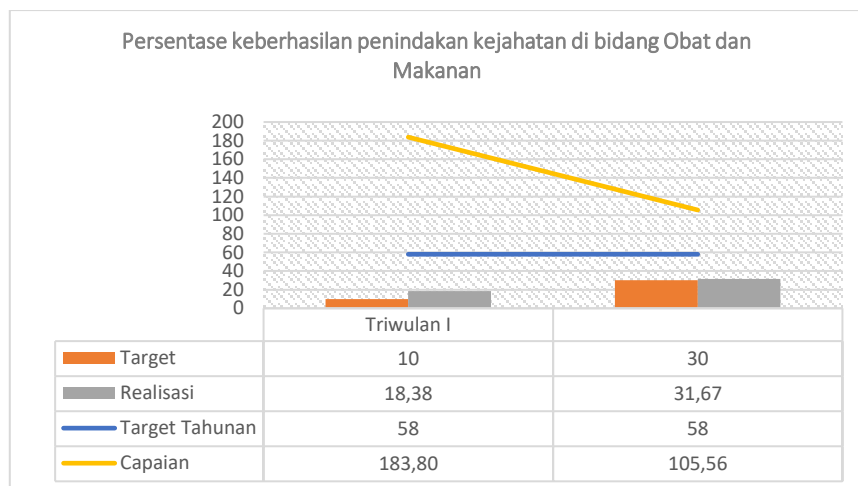
Nilai Tingkat Keberhasilan:

$$\{(15\% \times A) + (40\% \times B) + (30\% \times C) + (15\% \times D)\} \times (\text{jumlah capaian} / \text{target perkara})$$

Perhitungan realisasi perkara meliputi perkara tahun n dan perkara *carry over*.

b. Perbandingan realisasi dan capaian indikator kinerja tahun 2022 dengan tahun 2021

Capaian persentase keberhasilan penindakan obat dan makanan di wilayah kerja BBPOM di Jakarta periode triwulan kedua atau April–Juni 2022 adalah sesuai target yang ditetapkan yakni tingkat keberhasilan 31,67 dari target tingkat keberhasilan di triwulan kedua 2022 sebesar 30,00 dengan kriteria "baik". Hasil perhitungan tersebut menunjukkan bahwa pada triwulan kedua atau periode April–Juni 2022, Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta telah berhasil memenuhi indikator kinerja strategis yang ditetapkan yakni meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan. Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi penurunan capaian sebanyak 78,24 poin.



Gambar 23. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisa terhadap keberhasilan Kelompok Substansi Penindakan BBPOM di Jakarta untuk mencapai target meningkatnya efektivitas penindakan tindak pidana di bidang obat dan makanan terdiri atas beberapa faktor, antara lain:

1. Implementasi sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara efektif

Sistem monitoring dan evaluasi kinerja yang diterapkan meliputi penyelesaian perkara, patroli siber dan operasi intelijen. Secara internal dibuat sistem menggunakan *spreadsheet* yang dapat diakses oleh seluruh personel dimana saja dan kapan saja yakni Menara (Monitoring Penyelesaian Berkas Perkara). *Spreadsheet* ini dijalankan sejak tahun 2020 hingga saat ini. Dengan adanya monitoring kinerja secara konsisten, maka kendala dan hasil kerja dapat dengan mudah dipantau dan diatasi. Disamping itu monitoring dan evaluasi kinerja dilakukan pula secara berkala melalui pertemuan rutin (secara daring/luring) membahas progres penyelesaian perkara, permasalahan dan rencana tindaklanjutnya.

2. Koordinasi dengan *Criminal Justice System* (CJS) yang lebih optimal

Salah satu tugas pokok dan fungsi Penyidik PNS adalah menjalankan koordinasi dengan CJS lainnya seperti Korwas PPNS Polda Metro Jaya, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Pengadilan Negeri di wilayah DKI Jakarta. Pencapaian pada triwulan pertama ini merupakan hasil dari pelaksanaan koordinasi dengan CJS yang berkaitan langsung dengan penyelesaian perkara. Sebagai hasil dari koordinasi tersebut, dapat terlaksana proses penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa (tahap 2). Selain itu juga terdapat capaian P21 atas beberapa perkara tunggakan. Hal ini menunjukkan perkembangan ke arah penyelesaian perkara yang mempengaruhi indikator kinerja tahun 2022.

3. Peningkatan kerja sama dengan lintas sektor terkait

Di tengah maraknya sistem perdagangan secara daring yang diawasi melalui skema patroli siber, Poksi Penindakan tetap waspada akan peredaran produk obat dan makanan mengandung bahan berbahaya. Pada triwulan pertama ini, dijalin kerja sama dengan beberapa pihak untuk mengungkap peredaran pangan olahan mengandung bahan berbahaya. Kerja sama lintas sektor ini dilakukan sejak kegiatan penelusuran dan pendalaman informasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan operasi penindakan.

4. Pelaksanaan asistensi atau bantuan teknis oleh Deputi Bidang Penindakan yang lebih optimal

Salah satu upaya yang terus dilakukan oleh PPNS Balai Besar POM di Jakarta dalam penanganan/penyelesaian perkara khususnya perkara tunggakan adalah melalui pelaksanaan asistensi/pemberian bantuan teknis oleh Direktorat Penyidikan Obat dan Makanan BPOM.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Terdapat penambahan kegiatan untuk fungsi cegah tangkal di tahun 2022 ini. Dengan demikian, upaya pencapaian kinerja ditunjang dari 4 (empat) kegiatan yakni intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan.

Kegiatan cegah tangkal meliputi kegiatan analisis terhadap data hasil pengawasan yang telah dilakukan. Intelijen memanfaatkan analisis hasil pengawasan tersebut sebagai sumber informasi awal. Sumber informasi lainnya juga didapat dari kegiatan patroli siber oleh tim siber, pengaduan masyarakat, dan juga dari akses informasi yang dimiliki. Selanjutnya kegiatan penyidikan berkontribusi terhadap penyelesaian perkara. Kombinasi kegiatan ini yang menjadi penunjang keberhasilan pencapaian kinerja.

Selain itu, kegiatan koordinasi salah satunya melalui Gelar Perkara rutin yang diselenggarakan baik secara luring maupun daring dengan Korwas PPNS Polda Metro Jaya dan Direktorat Penyidikan BPOM juga menjadi kegiatan penunjang penyelesaian berkas perkara yang ditangani. Melalui gelar perkara tersebut dapat diidentifikasi kendala yang dihadapi penyidik dan dihasilkan rekomendasi dalam upaya penyelesaian berkas perkara.

e. **Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya**

Pencapaian triwulan II ini merupakan upaya penerapan rekomendasi perbaikan kinerja di tahun 2022. Selain itu, sebagaimana telah dijelaskan bahwa peningkatan efektivitas penindakan tindak pidana obat dan makanan merupakan hasil dari upaya komprehensif kegiatan cegah tangkal, intelijen, siber, hingga penyidikan perkara. Terlepas dari dinamika yang terjadi khususnya dalam perubahan struktur organisasi pada Deputi Bidang Penindakan BPOM dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka upaya penyesuaian dan peningkatan kompetensi personel kelompok substansi penindakan terus dilakukan.

Kegiatan yang dapat menunjang untuk mencapai target kinerja yang belum terlaksana di triwulan pertama akan disiapkan untuk dilaksanakan sesuai yang tercantum dalam dokumen *Plan of Action* 2022.

24. Indeks Reformasi Birokrasi Balai Besar POM di Jakarta

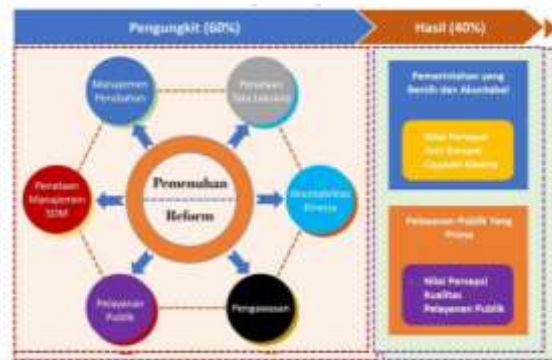
a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022*

Tabel 32. Target dan Realisasi Indeks RB BBPOM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Indeks RB Balai Besar POM di Jakarta	-	83,4	-	-	-

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

Balai Besar POM di Jakarta telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi pada tahun 2020 dan bertekad untuk mempertahankan dan meningkatkan menjadi Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Oleh karenanya dilakukan berbagai upaya peningkatan, inovasi dan terobosan untuk dapat meningkatkan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi. Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomo 90 Tahun 2021, Pembangunan Zona Integritas mencakup dua komponen yaitu Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil seperti terlihat pada gambar berikut :



Indeks RB diukur setiap tahun melalui penilaian Lembar Kerja Entitas dengan hasil yang disampaikan pada akhir tahun, sehingga belum tersedia data pada triwulan II

25. Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Tabel 33. Target dan Realisasi Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta BBPOM di Jakarta

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Nilai AKIP Balai Besar POM di Jakarta	-	80	-	-	-

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama.

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

1. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:

- a. Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)
- b. Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

2. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:

- a. Pemenuhan pengukuran (5%)
- b. Kualitas pengukuran (12,5%)
- c. Implementasi pengukuran (7,5%)

3. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:

- a. Pemenuhan pelaporan (3%)
- b. Kualitas pelaporan (7,5%)

- c. Pemanfaatan pelaporan (4,5%)
- 4. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
 - a. Pemenuhan evaluasi (2%)
 - b. Kualitas evaluasi (5%)
 - c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- 5. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
 - a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%)
 - b. Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)
 - c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Nilai AKIP merupakan penjumlahan 5 komponen penilaian evaluasi AKIP tersebut. Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja BB/BPOM di Jakarta adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Balai Besar POM di Jakarta dengan rentang nilai sebagai berikut:

Tabel 34. Kategori Penilaian SAKIP

No.	Nilai Pemenuhan Terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
1.	> 90	AA	Sangat memuaskan
2.	> 80 s.d. 90	A	Memuaskan
3.	> 70 s.d. 80	BB	Sangat baik
4.	> 60 s.d. 70	B	Baik
5.	> 50 s.d. 60	CC	Cukup baik
6.	> 30 s.d. 50	C	Agak kurang
7.	< 30	D	Kurang

Rentang nilai evaluasi AKIP pada tabel di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- (1) AA (Sangat Memuaskan) dengan nilai >90-100
- (2) A (Memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel) dengan nilai >80-90
- (3) BB (Sangat Baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal) dengan nilai >70-80
- (4) B (Baik, akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan) dengan nilai >60-70
- (5) CC (Cukup (Memadai), akuntabilitas kerjanya cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar) dengan nilai >50-60
- (6) C (Kurang, sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar) dengan nilai >30-50
- (7) D (Sangat Kurang, sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar) dengan nilai 0-30.

Pada triwulan II tahun 2022, nilai AKIP BBPOM di Jakarta belum terdapat realisasi dan capaian dikarenakan merupakan penilaian diakhir tahun.

Sasaran Strategis-9: Terwujudnya sumber daya manusia Balai Besar POM di Jakarta yang berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 9

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta

a. *Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022*

Tabel 35. Realisasi Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di Jakarta	-	84,5	-	-	-

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permen PANRB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:

- Kualifikasi: diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai
- Kompetensi: diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan
- Kinerja: diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS
- Disiplin: diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami

Menggunakan form survei sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 (yang disiapkan oleh Biro Umum dan SDM) kepada seluruh pegawai (ASN) di Balai Besar POM di Jakarta

Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas:

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (dua puluh lima persen);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (empat puluh persen);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (empat puluh persen); dan
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (lima persen).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN Balai Besar POM di triwulan I tahun 2022 belum ada realisasi dan capaian, nilai akan muncul pada akhir tahun

Sasaran Strategis-10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan Informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 10

27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP

a. Perbandingan target dan realisasi TW II dengan tahun 2022

Tabel 36. Realisasi persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP tahun 2022

Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian	
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	82	-	-	-

Yang dimaksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Laboratorium pengujian UPT untuk memenuhi Standar Good Laboratory Practice (GLP) atau Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.

Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian obat dan makanan sesuai standar GLP ditetapkan pada akhir tahun, sehingga capaian untuk triwulan II tahun 2022 ini belum dapat dihitung

28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal

a. Perbandingan target dan realisasi tahun 2022

Tabel 37. Realisasi Indeks pengelolaan data dan informasi Balai besar POM di Jakarta yang optimal tahun 2022

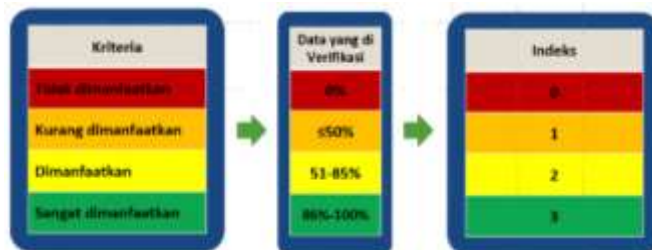
Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai Besar POM di Jakarta yang optimal	2,25	2,25	2,2	97,78	97,78	BAIK

Dihitung Indeks pengelolaan data dan informasi UPT terdiri dari 2 komponen, yaitu:

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC (BPOM Command Centre)

Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan oleh UPT yaitu SPIMKer (Data Keracunan) dan SIPT. Data kasus keracunan diinput oleh rumah sakit maupun oleh BBPOM di Jakarta melalui aplikasi SPIMKer. Kemudian data tersebut diverifikasi oleh petugas BBPOM Jakarta dengan timeline 30 HK dari tanggal input aplikasi. Cara perhitungan data Spimker sebagai berikut:

$$Spimker = \frac{\text{Jumlah kasus keracunan yang diverifikasi sesuai timeline}}{\text{Jumlah kasus keracunan yang diinput}} \times 100\%$$



SIPT merupakan Sistem Informasi Pelaporan Terpadu yang digunakan oleh BBPOM di Jakarta untuk melaporkan hasil pemeriksaan sampel, pengujian sampel dan pemeriksaan sarana kepada Badan POM secara online. Cara perhitungan data SIPT sebagai berikut:

$$SIPT = \frac{\% \text{ pemeriksaan sampel} + \% \text{ pengujian sampel} + \% \text{ pemeriksaan sarana}}{3}$$



1. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM

Indeks ini mencakup sistem informasi yang digunakan/ diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup *email*, *sharing folder*,

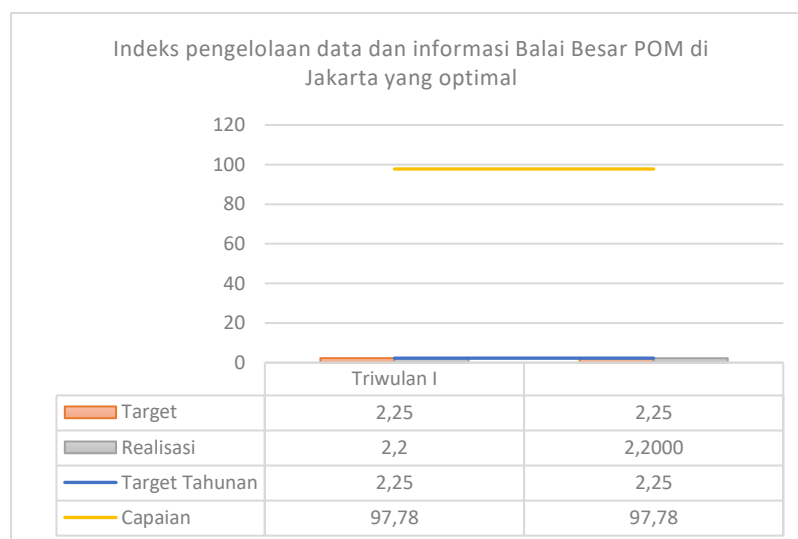
dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai. Pemanfaatan email yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bagian/kelompok substansi maupun individu.

Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi diperoleh dari Nilai Asesmen Pusat Data dan Informasi Nasional Badan POM dengan kriteria sebagai berikut:

- 2,26 – 3 : Optimal
- 1,51 – 2,25 : Cukup
- 0,76 – 1,5 : Kurang Optimal
- 0 – 0,75 : Sangat Kurang

b. Perbandingan realisasi dan capaian TW II tahun 2022

Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta pada TW II tahun 2022 adalah 2,2 kurang dari target yang ditetapkan yaitu target 2,25 sehingga diperoleh capaian 97.78% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan data dan informasi di BBPOM Jakarta telah dilakukan dengan optimal. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi mendukung Indikator Badan POM, yaitu Indeks SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) yang mendukung Sasaran 10 “Menguatnya laboratorium, riset analisis/kajian kebijakan, serta penerapan egovernment dalam pengawasan Obat dan Makanan” pada learning and growth perspective.



Gambar 24. Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pemantauan Indeks pengelolaan data dan informasi BBPOM di Jakarta dilakukan oleh Tim IT yang memiliki job description yang jelas dan tercantum dalam SK Tim IT. Dalam rangka mengawal nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal, dilakukan monitoring setiap bulan terhadap pencapaian masing-masing komponen penyusun indeks sehingga dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan

secara berkelanjutan. Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi 2,2 diperoleh dari penilaian komponen sebagai berikut:

1. Indeks Pemanfaatan Data dan Informasi (50%):

- *Email* (12,5%) = 3
- Pemanfaatan BOC (12,5%) = 3
- *Sharing Folder* (12,5%) = 3
- Berita Aktual (12,5%) = 3

2. Indeks Data dan Informasi yang Dimutakhirkan (50%):

- Spimker (20%) = 2
- SIPT (80%) = 2

Berdasarkan data tersebut nampak bahwa pemanfaatan email, BOC, sharing folder dan berita aktual serta pemutakhiran SPIMKer telah dilakukan secara optimal. Sedangkan Indeks Data dan Informasi yang dimutakhirkan belum optimal untuk SIPT. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya input SIPT yang terkendala kelengkapan bank data serta periode waktu tunggu antara sampling dan input hasil uji. Selain itu, nilai pemanfaatan SIPT pada Triwulan I 2022 cukup rendah sehingga berpengaruh terhadap nilai triwulan selanjutnya karena perhitungan indeks bersifat kumulatif.

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Ber Program/ kegiatan yang menunjang pencapaian Indeks Pengelolaan Data dan Informasi, yaitu:

- Pembentukan Tim IT dalam rangka mengawal Nilai Indeks Pengelolaan Data dan Informasi di BBPOM Jakarta dan dilakukan sosialisasi terkait komponen penilaian indeks pengelolaan data dan informasi untuk meningkatkan pemahaman anggota Tim IT sehingga dapat disusun langkah-langkah yang tepat dalam mengawal nilai indeks pengelolaan data dan informasi
- Program pemanfaatan email corporate secara berkala oleh setiap pegawai dalam pelaporan status kehadiran (WFO/WFH) setiap minggu telah berkontribusi terhadap meningkatnya nilai pemanfaatan email secara optimal
- Pemanfaatan sharing folder dilakukan dengan akses petugas pada saat pemeriksaan produk baik pada saat pemeriksaan di sarana maupun pemeriksaan penandaan obat sebagai tindak lanjut sampling produk. Pemanfaatan sharing folder sudah dilakukan dengan baik sehingga memperoleh nilai indeks 3.
- Pemantauan jumlah berita aktual dan viewer setiap bulan dengan jumlah minimal 10 berita aktual/ bulan dengan masing-masing minimal 101 viewer/ berita aktual
- Verifikasi dan tindak lanjut petugas Aplikasi Spimker secara tepat waktu sehingga diperoleh nilai indeks pemutakhiran spimker yang optimal (3)

- Pendampingan Pusdatin dalam penggunaan fitur baru pada SIPT berkontribusi terhadap meningkatnya kompetensi pegawai dalam melakukan penginputan dan pemanfaatan SIPT

Sasaran Strategis-11: Terkelolanya keuangan Balai Besar POM di Jakarta secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran Strategis 11

29. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta

a. Perbandingan target dan realisasi TW II tahun 2022

Tabel 38. Nilai kinerja anggaran Balai Besar POM di Jakarta TW II tahun 2022

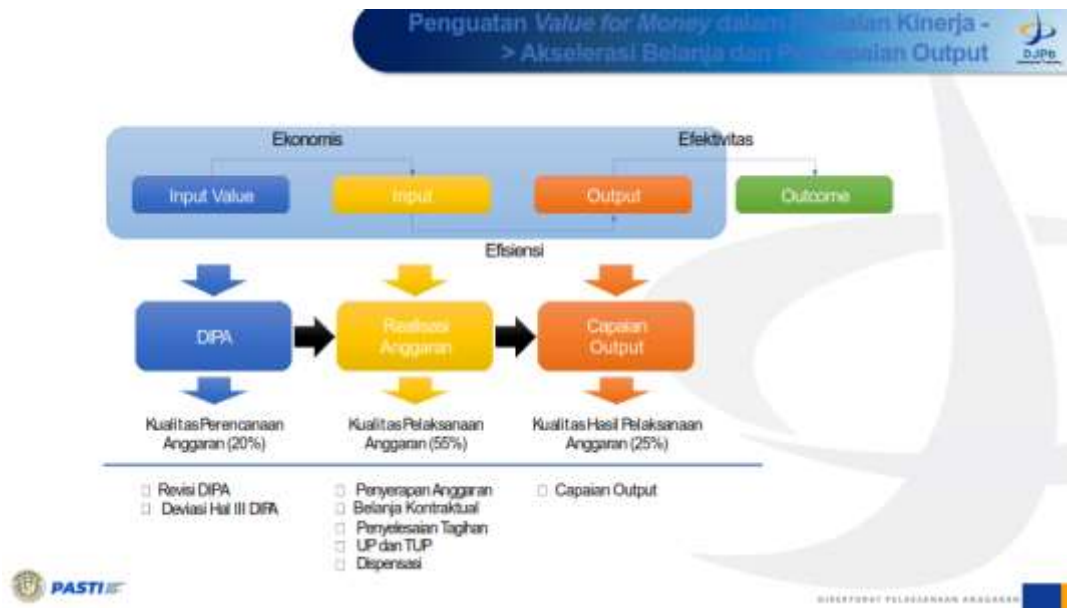
Indikator Kinerja	Target		Realisasi	Capaian		Kriteria
	TW II	Tahun 2022		TW II	Tahun 2022	
Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta	80	92,5	75,85	94,81	94,81	BAIK

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/ UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA). Nilai Kinerja Anggaran Balai Besar POM di Jakarta dihitung menggunakan rumus sebagai berikut:

$$NKA = (\text{Nilai EKA} \times 60\%) + (\text{Nilai IKPA} \times 40\%)$$

Kriteria Nilai Kinerja Anggaran ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yaitu:

- NKA > 90% termasuk kategori Sangat Baik;
- NKA lebih dari 80% sampai dengan 90% termasuk kategori Baik;
- NKA lebih dari 60% sampai dengan 80% termasuk kategori Cukup;
- NKA lebih dari 50% sampai dengan 60% termasuk kategori Kurang;
- NKA sampai dengan 50% (lima puluh persen) termasuk kategori Sangat Kurang,



Gambar 25. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian dengan formulasi pada tahun 2022 sebagai berikut :

Evaluasi Kinerja Anggaran berdasarkan Permenkeu No. 2/PMK.02/2021 Tentang Pengukuran Dan Evaluasi Kinerjaanggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dilakukan terhadap 3 aspek, yaitu aspek implementasi, aspek manfaat dan aspek konteks. Pada laporan kinerja ini, evaluasi kinerja anggaran dibahas berdasarkan aspek implementasi yaitu Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) terdiri dari 4 Indikator yaitu:

Indikator	Bobot
Penyerapan Anggaran	9,70%
Konsistensi	18,20%
Capaian Realisasi Output	43,50%
Efisiensi	28,60%

Nilai IKPA dan EKA dapat dilihat pada Aplikasi Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) atau Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART).



Gambar 26. Nilai EKA BBPOM Jakarta per 30 Juni 2022 pada aplikasi SMART



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

INDIKATOR PELAKSANAAN ANGGARAN

Sampul Dengan : JUNI

No	Kode KPPN	Kode BA	Kode Satker	Uraian Satker	Keterangan	Kualitas Perencanaan Anggaran		Kualitas Pelaksanaan Anggaran					Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran		Nilai Total	Konversi Bobot	Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)
						Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Konfektual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Dispensasi SPM	Capaian Output	Nilai			
1	175	003	432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	Nilai	100.00	83.15	80.34	100.00	90.00	90.97	100.00	96.07	91.05	100%	91.05	
					Bobot	10	10	20	10	10	5	25					
					Nilai Akhir	10.00	8.32	16.07	10.00	9.00	9.10	5.00	24.17				
					Nilai Aspek	91.58		92.26			96.07						

Disclaimer:

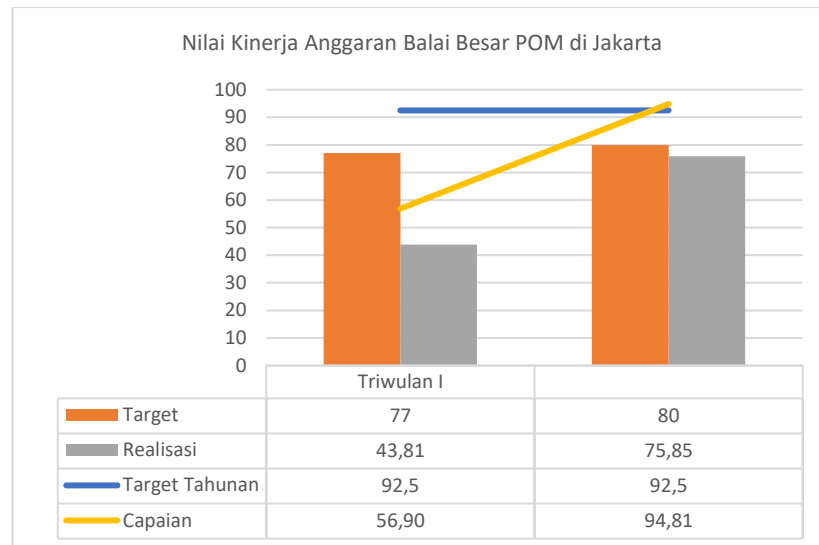
Besuai Perdirjen Perbendaharaan PER-5/PB/2022, indikator Revisi DIPA dan Penyerapan Anggaran tidak dihitung di Triwulan I 2022

Gambar 27. Nilai IKPA BBPOM Jakarta tw II tahun 2022 pada aplikasi OMSPAN

Berdasarkan gambar tersebut diatas nilai EKA adalah 65,32 dan Nilai IKPA adalah 91,65 dan diperoleh nilai NKA 94,81% dengan kategori "BAIK".

b. Perbandingan realisasi dan capaian tahun 2022

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran (NKA) triwulan II tahun 2022 dengan realisasi 75,85% dan capaian 94,81% dengan kriteria "BAIK". Jika dibandingkan dengan TW I, pada triwulan II ini terjadi peningkatan capaian sebanyak 37,91 poin.



Gambar. 28 Perbandingan target, realisasi, dan capaian TW I dan TW II

c. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

1. Penyelesaian tagihan dihitung berdasarkan rasio antara penyampaian SPM LS kontraktual Non Belanja Pegawai tepat waktu (17 hari kerja) terhadap seluruh SPM LS Kontraktual Non Belanja Pegawai pada TW II
2. Telah dilakukan penyesuaian Revisi Halaman III DIPA
3. Data kontrak disampaikan tepat waktu
4. Dilaksanakan penyesuaian Halaman III DIPA

d. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Program yang berpengaruh positif terhadap nilai kinerja anggaran adalah:

- Pelaporan kepada KPPN secara tepat waktu terkait penyampaian data kontrak, LPJ, SPM
- Pengalihan beberapa kegiatan dari onsite menjadi daring, misal pengawasan sarana produksi dan distribusi sehingga mampu berkontribusi terhadap tingkat efisiensi Program Pengawasan dan Pengendalian Lembaga karena realisasi volume outputnya jauh melampaui target
- Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran dan realisasi output secara berkala

e. Evaluasi dan analisis terkait tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan kinerja periode sebelumnya dan Upaya perbaikan (Rekomendasi perbaikan kinerja)

Berdasarkan hasil evaluasi sebelumnya, rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilakukan yaitu peningkatan komitmen dan sinergi antara pengelola kegiatan dan pengelola keuangan serta bagian pelaporan dan evaluasi. Untuk itu telah dilaksanakan program evaluasi berkala setiap bulan membahas capaian kinerja dan pelaksanaan anggaran serta tindak lanjut perbaikan dengan melibatkan seluruh pengelola kegiatan dan keuangan serta bagian pelaporan.

3.2 Realisasi Anggaran

Pada akhir tahun 2022, anggaran pada DIPA BBPOM di Jakarta adalah Rp. 45.606.169.000 dengan realisasi anggaran sebesar Rp 17.980.485.289 atau 39,43%



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA

PAGU DAN REALISASI BELANJA

Rincian / 01 - s.d. 100

No	SA-Selker	Nama Selker	KPPN	Ket	Jenis Belanja								Total	
					Pegawai	Barang	Modal	Bekas Bunga	Subsidi	Piutang	Bantuan	Lain-lain		Transfer
1	003-432747	BALAI BESAR PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN JAKARTA	176	PAGU	17.195.714.000	24.197.044.000	4.213.411.000	0	0	0	0	0	0	45.606.169.000
					REALISASI	8.621.087.561	7.770.032.863	1.589.354.743	0	0	0	0	0	17.980.485.289
					PERSENTASE	(50,14%)	(32,11%)	(37,72%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
				SISA	8.574.626.439	16.427.011.137	2.624.056.257	0	0	0	0	0	27.625.683.711	
TOTAL					PAGU	17.195.714.000	24.197.044.000	4.213.411.000	0	0	0	0	0	45.606.169.000
					REALISASI	8.621.087.561	7.770.032.863	1.589.354.743	0	0	0	0	0	17.980.485.289
					PERSENTASE	(50,14%)	(32,11%)	(37,72%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(39,43%)
					SISA	8.574.626.439	16.427.011.137	2.624.056.257	0	0	0	0	0	27.625.683.711

Gambar 29. Perbandingan pagu, realisasi anggaran, dan capaian realisasi anggaran BBPOM di Jakarta Triwulan II Tahun 2022

Realisasi anggaran TW II tahun 2022 sebesar 39,43%, apabila dilihat dari jenis belanja untuk realisasi anggaran pada jenis belanja gaji, kemudian jenis belanja barang, dan yang paling rendah adalah belanja modal. Upaya yang telah dilakukan Balai Besar POM di Jakarta dalam pengelolaan anggaran dan percepatan penyerapan anggaran adalah:

- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala
- Revisi anggaran untuk meningkatkan efisiensi pelaksanaan
- Peningkatan penggunaan sistem teknologi informasi komunikasi dalam pengelolaan keuangan
- Peningkatan kompetensi petugas pengelola keuangan terhadap kepatuhan dalam pengelolaan keuangan

Realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja.

3.3 Analisis Efisiensi Kegiatan

Fokus pengukuran efisiensi adalah indikator *input* dan *output* dari suatu kegiatan. Dalam hal ini efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input*, yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output terhadap % capaian input, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ capaian output}}{\% \text{ capaian input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1. Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien.

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi / ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut:

$$TE = \frac{(IE - SE)}{SE}$$

Tabel 39. Efisiensi Kegiatan Balai Besar POM di Jakarta TW II Tahun 2022

No		Target RO	Realisasi Volume RO	Persen Realisasi Output (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Kumulatif	Persen Realisasi Anggaran (%)	IE	TE	Capaian TE
1	Laporan Analisa Kejahatan Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jakarta	14	7	50	701.090.000	244.229.913	34,84	1,44	0,44	92%
2	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh BBPOM di Jakarta	477	279	58,49	948.000.000	289.504.305	30,54	1,92	0,92	88%
3	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh BBPOM di Jakarta	35	40	114,29	131.484.000	14.000.000	10,65	10,73	9,73	75%
4	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	1	0,55	55	519.350.000	201.271.440	38,75	1,42	0,42	92%
5	Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh BBPOM di Jakarta	35	15	42,86	143.077.000	26.431.055	18,47	2,32	1,32	84%

No		Target RO	Realisasi Volume RO	Persen Realisasi Output (%)	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran Kumulatif	Persen Realisasi Anggaran (%)	IE	TE	Capaian TE
6	Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1	0	0	82.596.000	0	0,00	0	-1,00	75%
7	Perangkat pengolahan data dan komunikasi	1	0,98	98	137.415.000	134.446.000	97,84	1,00	0,00	100%
8	Layanan Umum	1	0,49	49	1.319.525.000	465.162.548	35,25	1,39	0,39	95%
9	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,5	50	2.479.665.000	903.488.551	36,44	1,37	0,37	95%
10	PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BBPOM JAKARTA	9	4,5	50	714.978.000	197.747.840	27,66	1,81	0,81	75%
11	Sekolah dengan Pangan Lajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65	45,5	70	720.402.000	267.328.900	37,11	1,89	0,89	88%
12	Desa Pangan Aman	21	10,65	50,71	1.046.723.000	197.017.500	18,82	2,69	1,69	78%
13	Pasar aman dari bahan berbahaya	3	2,5	83,33	110.081.000	56.740.600	51,54	1,62	0,62	90%
14	KIE Obat dan Makanan Aman oleh BBPOM di Jakarta	6.300	3.530	56	2.460.540.000	1.162.611.544	47,25	1,19	0,19	100%
15	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM di Jakarta	919	452	49,18	851.980.000	88.171.345	10,35	4,75	3,75	75%
16	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh BBPOM di Jakarta	2.239	1.115	49,8	1.329.007.000	268.237.121	20,18	2,47	1,47	80%
17	Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh BBPOM di Jakarta	125	125	100	26.660.000	9.789.500	36,72	2,72	1,72	78%
18	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh BBPOM di Jakarta	333	177	53,15	275.704.000	68.397.460	24,81	2,14	1,14	86%
19	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh BB/BPOM	1.162	590	50,77	1.149.775.000	164.297.209	14,29	3,55	2,55	75%
20	Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice	1	0,5	50	3.345.578.000	1.454.908.745	43,49	1,15	0,15	100%
21	Layanan Perkantoran	1	0,4992	49,92	24.192.039.000	11.787.183.713	48,72	1,02	0,02	100%

Dalam konteks ini, tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisiensi kegiatan didasarkan pada rasio antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran. Pada masa mendatang, pengukuran efisiensi kegiatan perlu mempertimbangkan *input* yang lain dengan dukungan data yang lebih memadai. Pengukuran efisiensi kegiatan secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

Perlu dilakukan kajian terhadap penetapan input (anggaran) dan kaitannya baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pencapaian indikator pembangun sasaran strategis karena struktur anggaran dan indikator kinerja tidak selaras.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Capaian Kinerja Balai Besar POM di Jakarta pada Triwulan II Tahun 2022 untuk 11 sasaran strategis yang diukur melalui 29 indikator kinerja utama dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Dari 29 (dua puluh sembilan) indikator kinerja, 13 (tiga belas) indikator mencapai target dengan kategori **"baik"** ($90\% < x < 110\%$); 2 (dua) indikator mencapai kategori **"cukup"** ($70\% < x < 90\%$); 2 (dua) indikator mempunyai capaian melebihi 120% dengan kategori **"tidak dapat disimpulkan"**, 2 (dua) indikator mencapai target dengan kategori **"sangat baik"** ($110\% < x < 120\%$).
2. Hasil capaian empat sasaran strategis terbaik dari adalah sebagai berikut:

Nilai pencapaian tertinggi pertama adalah pada sasaran strategis ke-tujuh sebesar 117,83% dengan kriteria **TIDAK DAPAT DISIMPULKAN** menunjukkan keberhasilan Balai Besar POM di meningkatnya Meningkatkan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai Besar POM di Jakarta

Dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan di Jakarta dengan jumlah anggaran BBPOM di Jakarta Rp. 45.606.169.000,-, pada triwulan II tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 17.980.485.289 dengan capaian 39,43%. BBPOM di Jakarta berupaya melakukan perbaikan secara terus menerus untuk meningkatkan kinerja pada setiap tahun sehingga sasaran strategis dapat tercapai sesuai dengan target pada RENSTRA.

Secara garis besar sasaran strategis yang dirumuskan dalam Rencana Kinerja Triwulan II Tahun 2022 dan Perjanjian Kinerja 2022 dapat dicapai.

4.2. Saran

Upaya peningkatan kinerja yang dilakukan dimasa yang akan datang sebagai berikut:

1. Peningkatan konsistensi dan akuntabilitas pelaksanaan tata Kelola kinerja dan anggaran pada triwulan berikutnya.
2. Monitoring dan evaluasi terus menerus akan dilakukan disisa triwulan tahun 2022
3. Konsistensi revisi Halaman III Dipa yang perlu dikawal ketat.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2022

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Jakarta
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Jabatan : Kepala Balai Besar POM di Jakarta

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Jakarta, 09 Juli 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BBPOM di Jakarta

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95.5
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	87
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87.7
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	76.65
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT	91
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik UPT	4.30
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94.4
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	65
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	21
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	3
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	83.4
Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	80
Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.5
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.5

Kegiatan :

Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :

Rp.
45,606,169,000.00

Pihak Kedua

Jakarta, 09 Juli 2022

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP

Dra. Susan Gracia Arpan, Apt., M.Si.

Lampiran 2. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja BBPOM di Jakarta Tahun 2022



RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

BBPOM di Jakarta Badan Pengawas Obat dan Makanan

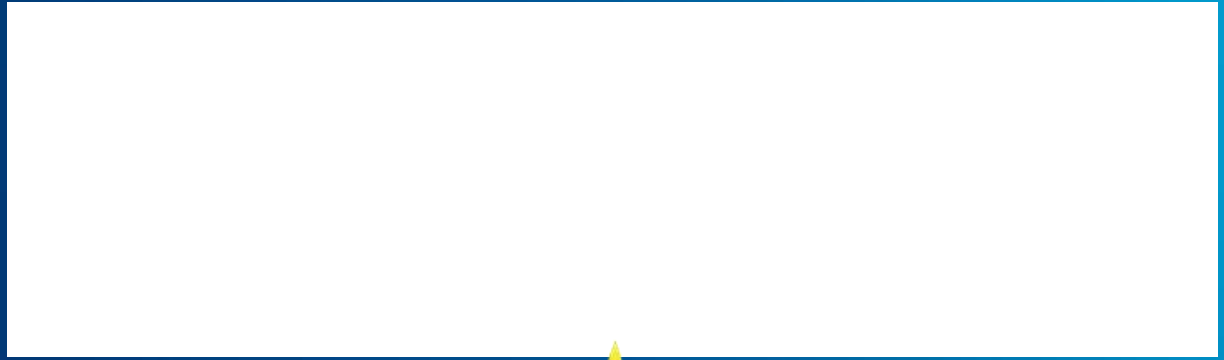
No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12		
1.	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	465.152.450,00
2.	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	95,5	298.193.000,00
3.	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	465.152.450,00
4.	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	298.193.000,00
5.	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	89	50.898.400,00
6.	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu													87	318.225.000,00
7.	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian imbalan dan pembatasan pengawasan Obat dan Makanan													87,7	46.325.000,00
8.	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan													79,65	123.287.300,00
9.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik UPT													91	330.571.000,00
10.	Persentase Kepuasan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	396.496.750,00
11.	Persentase Kepuasan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	396.496.750,00
12.	Persentase kepuasan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	295.830.000,00
13.	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	63	180.798.000,00

No.	Indikator Kinerja	Target											Anggaran	
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11		B12
14.	Persentase sarana distribus Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	632.202.500,00
15.	Indeks Pelayanan Publik UPT											4,30		371.262.500,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produk pangan stahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3,3	6,7	23,3	30	36,7	36,7	36,7	36,7	53,3	66,7	66,7	77	85.159.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	94,4	2.603.617.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman		20	30	30	55	70	70	70	90	90	90	85	767.240.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman		20	25	25	35	40	50	60	65	70	85	21	1.007.149.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	396.702.100,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar		5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	277.407.600,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan		5	10	15	20	30	35	40	45	50	55	58	1.444.886.000,00
23.	Indeks RB UPT											83,4		91.936.000,00
24.	Nilai AKIP UPT											80		54.154.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT											84,5		27.090.178.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP											82		6.770.065.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	137.915.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	75	76	77	78	79	80	82	84	86	88	90	92,5	28.800.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas		25	25	40	60	70	70	70	70	90	90	3	110.081.000,00
Total													45.806.109.000,00	




Lampiran 3. RHPK BBPOM di Jakarta TW II Tahun 2022

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	JUNI	Realisasi s.d bulan			Kriteria	
					Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di masing-masing wilayah kerja UPT	1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	81,00	81,00	71,95	88,83	88,83	CUKUP
		2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	95,50	95,50	96,72	101,28	101,28	BAIK
		3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	81,00	81,00	62,44	77,09	77,09	CUKUP
		4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	83,00	83,00	86,15	103,80	103,80	BAIK
		5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	89,00	89,00	82,98	93,23	93,23	BAIK
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja BBPOM di Jakarta	87,00		-	-	-	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	87,70		-	-	-	
		8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	76,65		-	-	-	
		9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	91,00		-	-	-	
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di masing-masing wilayah kerja UPT	10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	90,00	90,00	91,49	101,66	101,66	BAIK
		11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	79,00	79,00	77,42	98,00	98,00	BAIK
		12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	87,00	87,00	94,70	108,85	108,85	BAIK
		13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63,00	63,00	79,86	126,76	126,76	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN

	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	JUNI	Realisasi s.d bulan			Kriteria	
					Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n		
		14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	75,00	75,00	83,07	110,76	110,76	SANGAT BAIK
		15	Indeks Pelayanan Publik	4,3		-	-	-	
		16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	36,67	56,67	154,53	56,67	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	94,40	94,40	94,82	100,44	100,44	BAIK
		18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	65,00	70,00	70,00	100,00	70,00	BAIK
		19	Jumlah desa pangan aman	21,00	40,00	45,00	112,50	45,00	SANGAT BAIK
		20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	3,00	70,00	75,00	107,14	75,00	BAIK
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00	50,45	126,11	50,45	TIDAK DAPAT DISIMPULKAN
		22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	40,00	43,82	109,55	43,82	BAIK
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di masing-masing wilayah kerja UPT	23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	58,00	30,00	31,67	105,56	54,60	BAIK
8	Terwujudnya tatakelola pemerintahan UPT yang optimal	24	Indeks RB UPT	83,40		-	-	-	
		25	Nilai AKIP UPT	80,00		-	-	-	
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	26	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,50		-	-	-	
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan obat dan makanan	27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00		-	-	-	
		28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,25	2,2000	97,78	97,78	BAIK
	29	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92,50	80,00	75,85	94,81	84,17	BAIK



BALAI BESAR POM DI JAKARTA

 Jalan As'syafiiyah No.133, Cilangkap, Jakarta Timur
 021 843-04-047 / 843-04-049
 021 843-04-046 / 843-04-048
 bpom_jakarta@pom.go.id / bbpomjkt@gmail.com



 [BBPOMJakarta](#)

 [@BPOMJakarta](#)

 [@BPOMJakarta](#)

 [Balai Besar POM Jakarta](#)